



Kabupaten
Kudus

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Tahun 2023



DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUDUS

DAFTAR ISI

Halaman Cover	i
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
Kata Pengantar	iv
Ikhtisar Eksekutif	vi
Bab I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Kedudukan, Tugas Pokok & Fungsi.....	2
1.3. Struktur Organisasi.....	3
1.4. Sumber Daya Manusia, Sarpras dan Anggaran	5
1.5. Isu Strategis dan Permasalahan Utama	8
1.6. Landasan Hukum.....	12
1.7. Sistematika	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
2.1. Rencana Strategis.....	14
2.2. Rencana Kinerja	16
2.3. Perjanjian Kinerja	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	29
3.1 Capaian Kinerja DPMPTSP Kabupaten Kudus Tahun 2023	29
3.3 Realisasi Anggaran	78
3.4 Efisiensi Anggaran.....	86
BAB IV PENUTUP	99
4.1. Kesimpulan	99
4.2. Rekomendasi.....	100
LAMPIRAN	
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023	
Rencana Kerja Tahunan	
Penghargaan Yang Diraih Tahun 2023	
Inovasi Kemudahan Investasi Melalui Pro Investku	
Sosialisasi Pro Investku Dan Pendampingan LKPM	
Sosialisasi Dan Bimtek Implementasi Pengawasan Perizinan	
Berusaha Berbasis Risiko (OSS RBA)	
FGD Penyelesaian Permasalahan Dan Hambatan Realisasi Usaha	
Nilai Kinerja PTSP dan PPB Tahun 2023	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 1 Permasalahan DPMPTSP Kabupaten Kudus Tahun 2023.....	9
Tabel 2 1 Keterkaitan Visi Misi, Tujuan dan Sasaran	16
Tabel 2 2 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah.....	17
Tabel 2 3 Sasaran Strategis, IKU dan Target Kinerja	18
Tabel 2 4 Sasaran Strategis, IKU dan Program.....	19
Tabel 2 5 Perjanjian Kinerja (Perubahan) DPMPTSP Kabupaten Kudus Tahun 2023	21
Tabel 3 1 Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	29
Tabel 3 2 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023	30
Tabel 3 3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021, 2022 dan 2023 ...	38
Tabel 3 4 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode RPJMD.....	54
Tabel 3 5 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional	61
Tabel 3 6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif penyelesaian yang telah dilakukan.....	63
Tabel 3 7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi DPMPTSP	4
Gambar 2 Pohon Masalah Dinas PMPTSP Tahun 2023	8

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Kudus, bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Kudus No. 061/91/2022 tentang Perubahan Atas Lampiran II Keputusan Bupati Kudus Nomor 061/158/2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kudus dan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahun 2023, Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Rencana Strategis 2018 – 2023 yang telah ditetapkan.

Kudus, Februari 2024



Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tatakelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya dapat terus ditingkatkan.

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus Tahun 2023 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggung jawaban atas kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus berisikan informasi pengelolaan (manajemen) kegiatan-kegiatan serta program - program pembangunan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU), disimpulkan bahwa 2 (dua) indikator kinerja mempunyai persentase capaian dengan kategori "Sangat Tinggi" dan 1 indikator kinerja mempunyai persentase capaian dengan kategori "Sedang"

berdasarkan skala pengukuran kinerja Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut meliputi:

1. Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah (93,7%)
2. Realisasi Investasi (128,4%)
3. Nilai Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) (73,46%)

Persentase capaian Indikator Kinerja Utama nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah tahun 2023 sebesar 93,7%, mengalami penurunan sebesar 9,3% dibandingkan tahun 2022. Persentase capaian untuk realisasi investasi di tahun 2023 sebesar 128,4%, capaian ini meningkat sebesar 11,34% dibanding capaian tahun 2022. Sedangkan persentase capaian Nilai Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) di tahun 2023 sebesar 73,46% dimana Indikator Kinerja Utama ini merupakan indikator baru di tahun 2023 yang menggantikan Indikator Persentase Pelayanan Perizinan sesuai Standar Pelayanan.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, maka hasil evaluasi capaian kinerja ini dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus juga melaksanakan berbagai program dan kegiatan selama tahun 2023 sesuai tugas dan fungsinya di bidang penanaman modal, sebagai upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Untuk itu dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus akan menyajikan informasi mengenai pencapaian tujuan dan sasaran tersebut, dengan disertai realisasi indikator kinerja dan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja, dalam bentuk laporan pertanggungjawaban yang selanjutnya disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penilaian dan pelaporan kinerja perangkat daerah yang merupakan bagian dari pemerintah daerah menjadi salah satu unsur penting untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, yang mendukung perbaikan pelayanan publik sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus memuat pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus pada Tahun Anggaran 2023 yang disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus adalah:

1. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah;
2. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang;
3. Sebagai bukti akuntabilitas kepada publik atas penggunaan sumber daya dalam rentang waktu satu tahun.

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok & Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut :

1.2.1. Tugas Pokok

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus mempunyai tugas pokok :

- a. Melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
- b. Menyelenggarakan dan mengelola Mal Pelayanan Publik.

1.2.2. Fungsi

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. Penetapan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
- c. Pengkoordinasian perumusan program dan kegiatan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. Penyelenggaraan kebijakan, program dan kegiatan, serta perizinan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- e. Pengendalian dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan

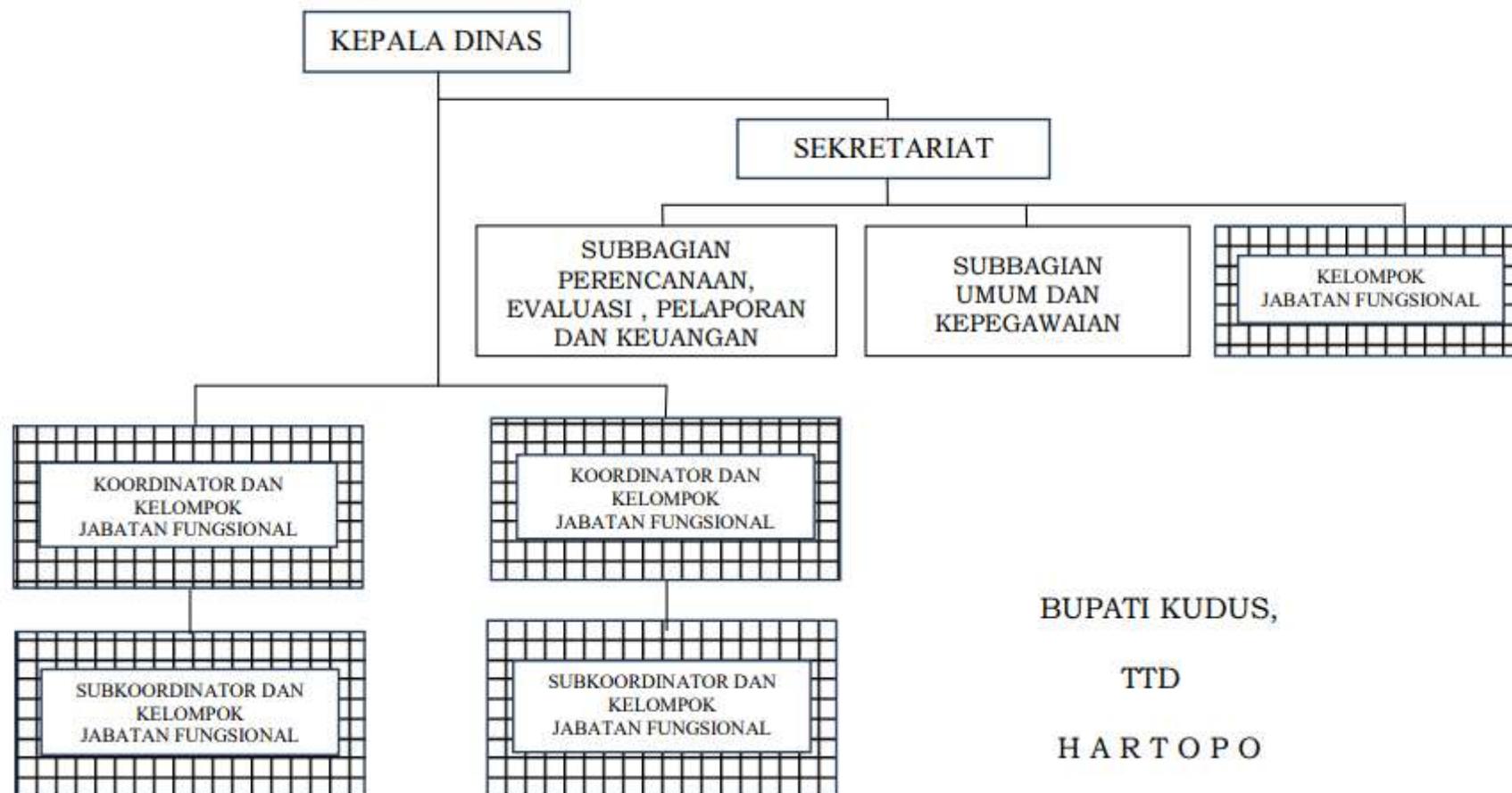
- f. Penyelenggaraan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- g. Penyelenggaraan fungsi kesekretariatan dinas;
- h. Pengendalian penyelenggaraan tugas unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- i. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut:

- 1. Kepala Dinas
- 2. Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Subbag Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan
 - b. Subbag Umum dan Kepegawaian
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- 3. Koordinator Penanaman Modal, terdiri atas:
 - a. Subkoordinator Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 - b. Subkoordinator Pembinaan dan Pemantauan Penanaman Modal
 - c. Subkoordinator Pengawasan Penanaman Modal
- 4. Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri atas:
 - a. Subkoordinator Pelayanan Perizinan Pembangunan dan Perekonomian
 - b. Subkoordinator Pelayanan Perizinan Lingkungan dan Jasa Usaha
 - c. Subkoordinator Pengolahan Data, Informasi dan Penanganan Pengaduan

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUDUS



Gambar 1 Struktur Organisasi DPMPTSP

1.4. Sumber Daya Manusia, Sarpras dan Anggaran

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu didukung dengan lingkungan strategis berupa Jumlah seluruh personil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada bulan Desember 2023 sebanyak 21 orang. Adapun perincian pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus terdiri dari :

a. Berdasarkan Jabatan

Jenis Jabatan	Pemangku	Eselon
Kepala Dinas	1	II
Sekretaris	1	III
Kasubag Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan	1	IV
Kasubag Umum dan Kepegawaian	1	IV
Koordinator Penanaman Modal	1	JF
Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	JF
Subkoordinator Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	-	JF
Subkoordinator Pengawasan Penanaman Modal	1	JF
Subkoordinator Pembinaan dan Pemantauan Penanaman Modal	1	JF
Subkoordinator Pengolahan Data, Informasi dan Penanganan Pengaduan	-	JF
Subkoordinator Pelayanan Perizinan Lingkungan dan Jasa Usaha	1	JF
Subkoordinator Pelayanan Perizinan Pembangunan dan Perekonomian	1	JF
Pelaksana	12	Pelaksana
Jumlah	21	

b. Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-Laki	: 9 Orang
2.	Perempuan	: 12 orang
	Jumlah	: 21 orang

c. Berdasarkan tingkat pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1.	Pasca Sarjana	: 2 orang
2.	Sarjana Strata 1	: 15 orang
3.	Diploma 3	: 2 orang
4.	SLTA	: 2 orang
	Jumlah	: 21 orang

d. Berdasarkan Golongan

No	Pangkat/Golongan Ruang	Jumlah
1.	Pengatur Tk. I/II d	: 1 orang
2.	Penata Muda/III a	: 2 orang
3.	Penata Muda Tk. I/III b	: 3 orang
4.	Penata/III c	: 2 orang
5.	Penata Tk. I/III d	: 10 orang
6.	Pembina/IV a	: 1 orang
7.	Pembina Tk I/IV b	: 1 orang
8.	Pembina Utama Muda/IV c	: 1 orang
	Jumlah	21 orang

e. Berdasarkan Umur

No	Usia	Jumlah
1.	> 50 Tahun	: 6 orang
2.	41 s/d 50 Tahun	: 14 orang
3.	31 s/d 40 Tahun	: 1 orang
	Jumlah	21 Orang

Berdasarkan data inventaris, guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus, sarana prasarana kantor yang tersedia sebagai berikut:

a. Sarana Ruangan

NO.	RINCIAN	JUMLAH RUANG
	Lantai 1	
1.	Ruang Pelayanan	1 unit
2.	Ruang Pengaduan	1 unit
3.	Ruang Laktasi	1 unit

NO.	RINCIAN	JUMLAH RUANG
	Lantai 2	
4.	Ruang Kepala Dinas	1 unit
5.	Ruang Rapat	1 unit
6.	Ruang Sekretariat	1 unit
7.	Ruang Pelayanan	1 unit
	Lantai 3	
8.	Ruang Pemroses	1 unit
9.	Ruang Pelayanan	1 unit
10.	Ruang Rapat	1 unit
11.	Ruang Arsip	1 unit
12.	Gudang	1 unit
13.	Pantry	1 unit
	Jumlah	13 unit

b. Sarana Mobilitas

NO.	RINCIAN	JUMLAH
1.	Mobil	3 unit
2.	Motor	7 unit
	Jumlah	10 unit

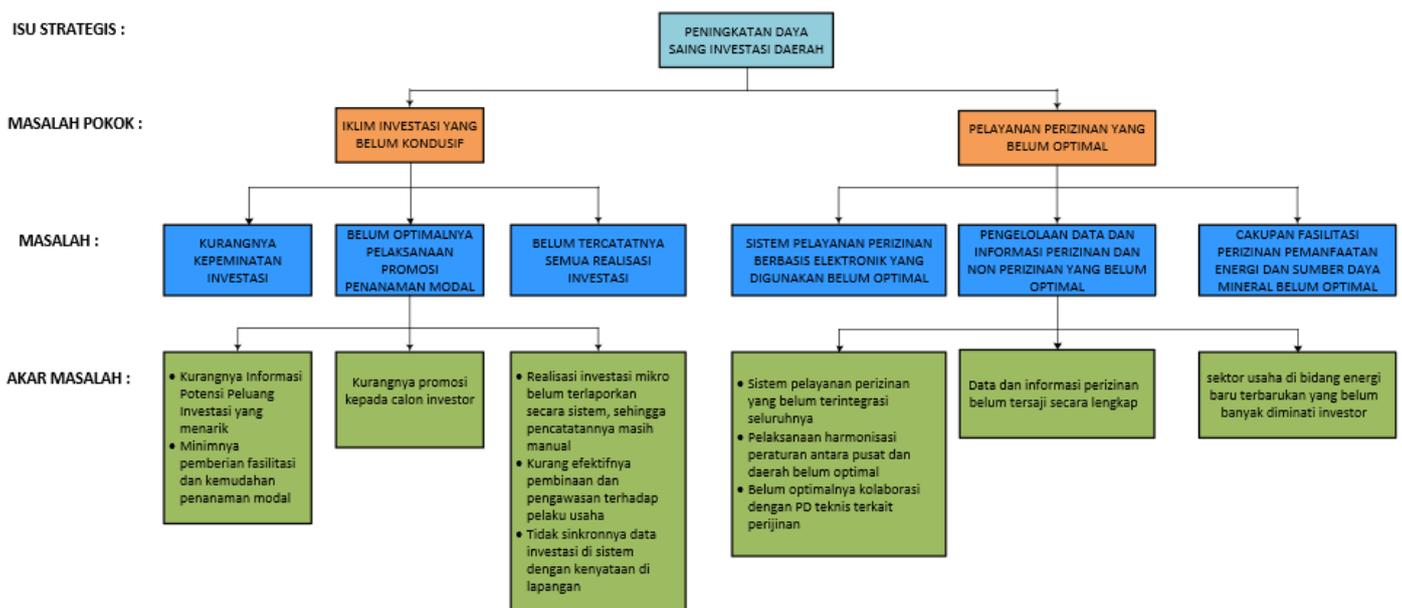
c. Sarana Perlengkapan Kantor

NO.	RINCIAN	JUMLAH BARANG
1.	Komputer PC	31 unit
2.	note book	17 unit
3.	Server	5 unit
4.	Telepon	1 unit
5.	Printer	34 unit
6.	LCD proyektor	2 unit
7.	Kamera digital	1 unit
8.	GPS	1 unit
9.	Scanner	4 unit
10.	AC	27 unit
11.	Kotak saran	1 unit
12.	Meja Informasi	2 unit
13.	Meja	85 unit
14.	Kursi	90 unit
15.	Wireless	1 unit
16.	Mesin Ketik	2 unit
17.	Almari	36 unit
18.	Filling Kabinet	15 unit
19.	Rak Arsip	19 unit
20.	Almari arsip besar	1 unit

1.5. Isu Strategis dan Permasalahan Utama

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/Panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Selain penanganan terhadap isu strategis, perlu dilakukan juga identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi, telaah visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Kudus.

Identifikasi Permasalahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut:



Gambar 2. Pohon Masalah Dinas PMPTSP Tahun 2023

Isu Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus Tahun 2023 adalah Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah. Masalah pokok dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas PMPTSP adalah belum optimalnya iklim investasi yang kondusif dan belum optimalnya pelayanan perizinan. Iklim investasi yang belum kondusif dikarenakan kurangnya keperminatan investasi, belum optimalnya promosi penanaman modal dan belum tercatatnya realisasi investasi. Sedangkan belum optimalnya pelayanan perizinan dikarenakan sistem pelayanan perizinan berbasis elektronik yang digunakan belum optimal, pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang belum optimal dan cakupan fasilitasi perizinan pemanfaatan energi dan sumber daya mineral yang belum optimal. Permasalahan dalam pelaksanaan program-program di tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Permasalahan DPMPTSP Kabupaten Kudus Tahun 2023

NO	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN
1	Meningkatkan Pertumbuhan Investasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Perangkat Daerah (PTSP)	85 indek	88,79 indeks	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya pendampingan yang dilakukan kepada pelaku usaha/pemohon izin dalam mengisi survey kepuasan masyarakat atas pelayanan kinerja di DPMPTSP Kab. Kudus.
		Meningkatnya iklim investasi	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Cakupan Sinkronisasi Kebijakan Penanaman Modal	100%	100%	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan SDM yang kompeten belum mencukupi. • Penyusunan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dalam tahap koreksi dari Bagian Hukum.
							<ul style="list-style-type: none"> • Belum tersedianya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai acuan tentang Tata Ruang Investasi. • Ketersediaan SDM yang kompeten terkait tata ruang belum mencukupi. • Belum tersedianya program prioritas dalam roadmap pembangunan di Kabupaten Kudus.

NO	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	persentase peningkatan jumlah investor	10%	215,11%	<ul style="list-style-type: none"> • Belum tersedianya SDM yang kompeten dalam pelaksanaan promosi investasi. • Keterbatasan Informasi tentang event pameran investasi. • Keterbatasan anggaran untuk kegiatan pameran. • Belum optimalnya inovasi dalam kegiatan promosi.
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Realisasi investasi yang dilaporkan	3,497 Trilyun	1,69 Trilyun	<ul style="list-style-type: none"> • Realisasi investasi dilaporkan merupakan penjumlahan dari realisasi investasi skala mikro (TW IV) ditambah Realisasi LKPM (TW III) sehingga nilainya belum maksimal karena Realisasi LKPM TW IV baru akan release di akhir Januari 2024. • Pelaksanaan Monev Pengawasan belum maksimal karena keterbatasan SDM dan Sarpras kendaraan dinas. • Belum optimalnya koordinasi dengan OPD teknis pemegang hak akses pengawasan.
		Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelayanan perizinan pembangunan dan	60%	100%	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan tentang SP dan SOP yang mendasarkan kepada Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 telah

NO	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN
				lingkungan yang sesuai dengan Standar pelayanan			disusun tetapi masih dalam tahap koreksi di Bagian Hukum.
				Persentase pelayanan perizinan perekonomian dan jasa usaha yang sesuai dengan Standar pelayanan	80%	100%	<ul style="list-style-type: none"> • Masih terdapat perizinan dan non perizinan yang ditangani secara manual (belum terakomodir di OSS maupun SIPTO). • Keterbatasan SDM yang kompeten di bidang pelayanan perizinan. • Koordinasi dengan OPD terkait pemegang hak akses perizinan yang belum optimal.
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Cakupan Data dan Informasi Penanaman Modal yang dirilis	100%	100%	<ul style="list-style-type: none"> • Data perizinan dan investasi masih dikelola masing-masing bidang sehingga data belum dapat tersaji secara lengkap menyeluruh
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				
			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	cakupan fasilitasi perizinan pemanfaatan energi dan sumber daya mineral	100%	100%	<ul style="list-style-type: none"> • Belum ada usaha untuk energy baru terbarukan yang membutuhkan fasilitasi legalitas usaha di Kabupaten Kudus.

1.6. Landasan Hukum

1. Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaporan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus;
3. Peraturan Bupati Kudus Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus;
4. Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2023;
5. Peraturan Bupati Kudus Nomor 35 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2023;
6. Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2023.

1.7. Sistematika

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sesuai Permenpan No. 53 Tahun 2014 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

3.2 Analisis Capaian Kinerja

Pada sub bab ini disajikan analisis capaian kinerja dari setiap capaian kinerja organisasi.

3.3 Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Rencana strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang disusun pada tahun 2018-2023 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 800/04.4/15.SK/2019 tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023.

1. Visi Kabupaten Kudus

Dalam perencanaan Kabupaten yang ditetapkan melalui RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 mencantumkan Visi dan Misi arah kebijakan yang akan menjadi tujuan dari Pemerintah Daerah untuk lima tahun kedepan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa Perangkat Daerah merupakan kepanjangan tangan Bupati yang mendukung Visi Bupati, sehingga Perangkat Daerah tidak memiliki Visi tersendiri. Visi Kabupaten Kudus untuk lima tahun (2018-2023) adalah sebagai berikut : ” **Kudus Bangkit Menuju Kabupaten Modern, Relegius, Cerdas dan Sejahtera**”.

2. Misi Kabupaten Kudus

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Ada empat (4) misi Kabupaten yang digunakan dalam mewujudkan visi tersebut :

1. Mewujudkan masyarakat Kudus yang berkualitas, kreatif, inovatif dengan memanfaatkan teknologi dan multimedia
2. Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik
3. Mewujudkan kehidupan yang toleran dan kondusif

4. Memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang berdaya saing.

Adapun Misi Kabupaten Kudus untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Misi ke-4 yaitu :

“Memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim Usaha yang Berdaya saing”.

3. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Rumusan tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi perangkat daerah dan memiliki keterkaitan dengan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran –sasaran yang ingin dicapai. Tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus adalah **“Meningkatkan Pertumbuhan Investasi”**

b. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, dan terukur setiap tahunnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Indikatornya adalah hal-hal yang dapat dijadikan petunjuk tentang keberhasilan atau kegagalan pencapaian target yang telah ditentukan pada tahun yang bersangkutan. Sasaran Perangkat Daerah yang ditetapkan merupakan sasaran yang akan dijabarkan dalam program dan kegiatan. Adapun indikator kinerja sasaran yang digunakan merupakan medium term outcome atau hasil jangka menengah. Sasaran yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus berdasarkan tujuan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.
2. Meningkatnya iklim investasi.
3. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan.

Sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus, maka Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus menyelaraskan tujuan, sasaran yang akan dicapai selama tahun 2018-2023 dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang sudah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kudus. Hal ini dapat dilihat dalam tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1 Keterkaitan Visi Misi, Tujuan dan Sasaran

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	TARGET CAPAIAN					TARGET AKHIR RENSTRA
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	Meningkatkan Pertumbuhan Investasi		Persentase Pertumbuhan Investasi	3,4%	1,90%	9,70%	7,75%	5,39%	5,39%
1.1		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Evaluasi SAKIP	74	75	75,8	76	76,5	76,5
1.2		Meningkatnya iklim investasi	Realisasi Investasi	7,59 T	7,74 T	8,34 T	8,79 T	9,19 T	9,19 T
1.3		Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Persentase Pelayanan Perizinan sesuai standar pelayanan	39,69%	40,57%	52,33%	55,59%	-	-
			Nilai Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB)	-	-	-	-	83	83

2.2. Rencana Kinerja

Strategi dan kebijakan dalam Renstra perangkat daerah adalah strategi dan kebijakan yang dilakukan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Berikut ini adalah Strategi dan Kebijakan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus 2018–2023:

Tabel 2.2 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Pertumbuhan Investasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Meningkatkan kualitas ASN	Perencanaan pembuatan Mall Pelayanan Publik (MPP)
			Meningkatkan sarana prasarana kerja pelayanan
			Pengiriman ASN untuk pelatihan teknis dan pengembangan kompetensi
	Meningkatnya iklim investasi	Meningkatkan kualitas kajian potensi peluang investasi	Menciptakan peluang investasi yang padat karya dengan mendorong inovasi bagi pengembangan investasi
		Meningkatkan inovasi promosi investasi	Kolaborasi promosi investasi dengan OPD terkait
		Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Investasi	
		Peningkatan penyelesaian pengaduan masyarakat	Memberikan kemudahan akses bagi penanganan pengaduan
	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Mempermudah dan mempercepat pelayanan perizinan sesuai dengan standar pelayanan	Pengembangan sistem pelayanan perizinan online

Strategi dan kebijakan jangka menengah perangkat daerah menunjukkan bagaimana cara perangkat daerah mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah. Keberhasilan pencapaian sasaran strategis diukur dengan Indikator Kinerja Utama dan target yang ditetapkan selama 5 tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3 Sasaran Strategis, IKU dan Target Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Pengukuran dan Tipe Perhitungan	Satuan	Target				
				2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Sakip Perangkat Daerah	Penilaian dari hasil evaluasi oleh Inspektorat Non Kumulatif	Nilai	74	75	75,8	76	76,5
Meningkatnya Iklim Investasi	Realisasi Investasi	Penjumlahan Nilai Realisasi dilaporkan dan realisasi invesasi yang belum dilaporkan Non Kumulatif	Trilyun	7,59	7,74	8,34	8,79	9,19
Meningkatnya kualitas Pelayanan Perizinan	Prosentase Pelayanan Perizinan sesuai standart pelayanan	Penjumlahan dari jumlah SK terbit sesuai Standart Pelayanan dibagi jumlah SK terbit dikalikan 100 persen Non Kumulatif	%	39,69	40,57	52,33	55,59	-
	Nilai Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB)	Hasil Penilaian dari BKPM Non Kumulatif	Nilai	-	-	-	-	83

Strategi dan kebijakan dalam Renstra perangkat daerah selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan perangkat daerah bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi perangkat daerah. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Penentuan program dan kegiatan harus selaras dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Pencapaian tersebut menggunakan indikator-indikator kinerja yang digunakan. Indikator Kinerja adalah tanda yang

berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact) dan kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Berdasarkan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2021 dari Kementerian PAN RB perlu melakukan penyempurnaan tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja utama. Dinas PMPTSP melakukan perubahan indikator kinerja utama pada sasaran strategis ketiga yaitu prosentase pelayanan perizinan sesuai standar pelayanan di tahun 2023 diubah menjadi nilai kinerja pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dan percepatan pelaksanaan berusaha (PPB). Perubahan tersebut dituangkan dalam Keputusan Bupati Kudus Nomor 061/91/2022 tentang Perubahan atas Lampiran II Keputusan Bupati Kudus Nomor 061/158/2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kudus dan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus.

Rencana program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus yang tertuang dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2023 merupakan serangkaian langkah penjabaran dari kebijakan dan strategi yang akan dilakukan untuk mewujudkan sasaran dan tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus. Keterkaitan Renstra dengan Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4 Sasaran Strategis, IKU dan Program

Sasaran Strategis	IKU	Program
Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Sakip Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
Meningkatnya Iklim Investasi	Realisasi Investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
		Program Promosi Penanaman Modal
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Sasaran Strategis	IKU	Program
Meningkatnya kualitas Pelayanan Perizinan	Nilai Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB)	Program Pelayanan Penanaman Modal
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
		Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan

2.3. Perjanjian Kinerja

Sebagai wujud implementasi kinerja, perlu disusun perjanjian kinerja yang berisikan penugasan dari pimpinan yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan komitmen pimpinan unit kerja sebagai penerima amanah dan kesepakatan antara pemberi amanah dan penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati merupakan hasil (output) atas kegiatan dan wujud kinerja (outcome) dari program pada tahun berjalan serta dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya secara berkesinambungan, dengan orientasi terhadap target capaian kinerja di periode akhir Renstra.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan / kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Kepala DPMPTSP Kabupaten Kudus pada Tahun 2023 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Kudus untuk mewujudkan target kinerja melalui manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel yang berorientasi kepada hasil kinerja (terlampir). Bentuk perwujudan dari perjanjian kinerja tersebut, DPMPTSP Kabupaten Kudus telah melaksanakan 2 urusan, yaitu urusan Penanaman Modal dan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral, terbagi menjadi 7 Program dengan 14 kegiatan dan 31 sub kegiatan yang didukung anggaran APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 6.719.437.284,- pada penetapan APBD 2023. Selanjutnya pada Perubahan APBD 2023, alokasi anggaran berubah menjadi Rp. 5.205.123.652,-.

Perjanjian Kinerja Kepala DPMPTSP Tahun 2023 memuat 3 sasaran strategis dengan 3 Indikator Kinerja Utama. Sasaran Strategis yang pertama adalah meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan indikator kinerja utama nilai evaluasi sakip perangkat daerah mempunyai target sebesar 76,5 dan anggaran sebesar Rp. 4.396.186.460,-. Sasaran strategis kedua adalah meningkatnya iklim investasi dengan indikator kinerja utama realisasi investasi mempunyai target yang harus dicapai sebesar 9,19 Triyun dan anggaran sebesar Rp. 584.767.040,-. Sedangkan sasaran strategis ketiga meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dengan indikator kinerja utama nilai kinerja PTSP dan PPB mempunyai target sebesar 83 dan anggaran sebesar Rp. 224.170.152,-. Perjanjian Kinerja Kepala DPMPTSP Tahun 2023 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.5 berikut ini:

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja (Perubahan) DPMPTSP Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Anggaran
1	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Sakip Perangkat Daerah	76,5	4.396.186.460
2	Meningkatnya Iklim Investasi	Realisasi Investasi	9,19 Trilyun	584.767.040
3	Meningkatnya kualitas Pelayanan Perizinan	Nilai Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB)	83	224.170.152

Perjanjian Kinerja Pejabat eselon III dan Koordinator bertanggung jawab atas tercapainya indikator kinerja dan realisasi anggaran program dan kegiatan, sedangkan Pejabat eselon IV dan sub koordinator bertanggung jawab atas tercapainya indikator kinerja dan realisasi anggaran sub kegiatan. Seluruh Perjanjian kinerja Pejabat eselon III, Koordinator, Pejabat eselon IV dan sub koordinator dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (PTSP)	85 Indeks	4.396.186.460	Sekretaris Dinas
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi sesuai standar	29 dokumen	3.194.850	Sekretaris Dinas
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 dokumen	1.597.425	Kasubbag PEP dan Keuangan
b	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18 Laporan	1.597.425	Kasubbag PEP dan Keuangan
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai standar	29 laporan	3.596.383.500	Sekretaris Dinas
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 orang/bulan	3.553.506.000	Kasubbag PEP dan Keuangan
b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	41.280.000	Kasubbag PEP dan Keuangan
c	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	17 dokumen	1.597.500	Kasubbag PEP dan Keuangan
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan hasil pengelolaan kepegawaian sesuai standar	1 Laporan	48.599.780	Sekretaris Dinas

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
a	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 orang	48.599.780	Kasubbag Umum Kepegawaian
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar	100%	229.633.330	Sekretaris Dinas
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	3.691.000	Kasubbag Umum Kepegawaian
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	40.929.000	Kasubbag Umum Kepegawaian
c	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	14.460.000	Kasubbag Umum Kepegawaian
d	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	44.688.230	Kasubbag Umum Kepegawaian
e	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	28.721.100	Kasubbag Umum Kepegawaian
f	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 dokumen	8.400.000	Kasubbag Umum Kepegawaian
g	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	88.744.000	Kasubbag Umum Kepegawaian
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan sesuai ketentuan (perpres pengadaan barjas dan RKBU)	25 unit	141.558.000	Sekretaris Dinas
a	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	25 unit	141.558.000	Kasubbag Umum Kepegawaian

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penggunaan jasa penunjang urusan yang sesuai ketentuan	5 Laporan	201.326.000	Sekretaris Dinas
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	5.000.000	Kasubbag Umum Kepegawaian
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	85.250.000	Kasubbag Umum Kepegawaian
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	111.076.000	Kasubbag Umum Kepegawaian
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit BMD yang dipelihara sesuai standar	43 unit	175.491.000	Sekretaris Dinas
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 unit	140.994.000	Kasubbag Umum Kepegawaian
b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 unit	34.497.000	Kasubbag Umum Kepegawaian
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Cakupan Sinkronisasi Kebijakan Penanaman Modal	100%	63.449.475	Koordinator Penanaman Modal
2.1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kebijakan pemberian kemudahan, fasilitasi/insentif di bidang penanaman modal	1 dokumen	6.551.250	Koordinator Penanaman Modal
a	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah dokumen bahan penyusunan kebijakan tentang kemudahan, fasilitas/Insentif di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan	1 dokumen	6.551.250	Sub Koordinator Pengawasan Penanaman Modal

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
		Kabupaten Jumlah Peraturan Daerah/ Provinsi dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	1 dokumen		
2.2	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten /Kota	Jumlah sistem peta potensi yang dikelola	1 sistem	56.898.225	Koordinator Penanaman Modal
a	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peraturan daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten /Kota	1 dokumen	2.898.700	Sub Koordinator Pengawasan Penanaman Modal
b	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen tentang potensi dan atau kajian peluang investasi Kabupaten Jumlah peta potensi investasi dan peluang usaha Kabupaten/ kota	1 dokumen 1 dokumen	53.999.525	Sub Koordinator Pengawasan Penanaman Modal
3	Program Promosi Penanaman Modal	persentase peningkatan jumlah investor	10%	152.448.765	Koordinator Penanaman Modal
3.1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Penanaman Modal	1 kali	152.448.765	Koordinator Penanaman Modal
a	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah dokumen bahan penyusunan strategi promosi penanaman modal Daerah Jumlah Peraturan Daerah yang mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/ kota	1 dokumen 1 dokumen	59.873.465	Sub Koordinator Pengawasan Penanaman Modal

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
b	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal kabupaten/kota Jumlah kegiatan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Kabupaten	4 dokumen 4 kegiatan	92.575.300	Sub Koordinator Pengawasan Penanaman Modal
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase pelayanan perizinan pembangunan dan lingkungan yang sesuai standar pelayanan	60%	137.678.982	Kepala Dinas
		Persentase pelayanan perizinan perekonomian dan jasa usaha yang sesuai standar pelayanan	80%		
4.1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah perizinan terbit sesuai dengan standar pelayanan	12.000 SK	137.678.982	Kepala Dinas
a	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	7500 pelaku usaha	127.181.850	Sub Koordinator Pelayanan Perizinan Lingkungan dan Jasa Usaha
b	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	20 kegiatan usaha	3.000.000	Sub Koordinator Pelayanan Perizinan Lingkungan dan Jasa Usaha

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
c	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	12 orang	7.497.132	Sub Koordinator Pelayanan Perizinan Pembangunan dan Perekonomian
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	realisasi investasi yang dilaporkan	3,497 Trilyun	368.868.800	Koordinator Penanaman Modal
5.1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM	500 perusahaan	368.868.800	Koordinator Penanaman Modal
a	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	350 pelaku usaha	265.419.800	Sub Koordinator Pembinaan dan Pemantauan Penanaman Modal
b	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	200 kegiatan usaha	103.449.000	Sub Koordinator Pembinaan dan Pemantauan Penanaman Modal
6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Cakupan Data dan Informasi Penanaman Modal yang dirilis	100%	84.541.170	Kepala Dinas
6.1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sistem informasi yang dikelola	2 aplikasi	84.541.170	Kepala Dinas
a	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	12 dokumen	84.541.170	Sub Koordinator Pelayanan Perizinan Pembangunan dan Perekonomian

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
	Terintegrasi secara Elektronik				
7	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	cakupan fasilitasi perizinan pemanfaatan energi dan sumber daya mineral	100%	1.950.000	Kepala Dinas
7.1	Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan fasilitasi pemanfaatan langsung panas bumi	2 kali	1.950.000	Kepala Dinas
a	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	2 dokumen	1.950.000	Sub Koordinator Pelayanan Perizinan Lingkungan dan Jasa Usaha

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja DPMPTSP Kabupaten Kudus Tahun 2023

Pengukuran kinerja dilakukan atas kegiatan dan sasaran dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja dengan realisasinya. Kriteria yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun melalui Rencana Kinerja Tahun 2023. Selanjutnya pada akhir tahun 2023 target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasi kinerja dalam periode 1 tahun sehingga diketahui tingkat pencapaian kerjanya. Pencapaian kinerja tersebut dievaluasi dan dianalisis guna menetapkan strategi untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	≥ 90,1	Sangat Tinggi
2	75,1 - 90	Tinggi
3	65,1 - 75	Sedang
4	50,1 - 65	Rendah
5	0 s/d 50	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri 86 Tahun 2017

Pada Tahun 2023, DPMPTSP Kabupaten Kudus telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan Renstra DPMPTSP Kabupaten Kudus 2018-2023 sebagai dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan, dan Renja DPMPTSP Tahun 2023 yang merupakan dokumen perencanaan tahunan. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus disajikan sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun

- ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
 5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
 7. Analisis Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

3.1.1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama DPMPTSP Kabupaten Kudus Tahun 2023, persentase capaian nilai evaluasi SAKIP sebesar 93,7%, realisasi investasi sebesar 128,40% dan Nilai Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) sebesar 73,46%. Indikator nilai evaluasi SAKIP dan realisasi investasi termasuk dalam kategori “sangat tinggi” dan Nilai Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) termasuk dalam kategori “Sedang”.

Tabel 3.2 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	KATEGORI
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Evaluasi SAKIP	76,5	71,70	93,7%	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya iklim investasi	Realisasi Investasi	9,19 T	11,80 T	128,40%	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Nilai Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB)	83	60,97	73,46%	Sedang

Pengukuran kinerja terhadap indikator program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2023 hampir seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan

termasuk dalam kategori kinerja “Sangat Tinggi”. Sedangkan Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dan Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal termasuk dalam kategori kinerja “Tinggi”. Pengukuran kinerja seluruh Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta kategori capaian kinerjanya disajikan dalam tabel berikut:

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSEN TASE CAPAIAN	KATEGORI
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Kepuasan Masyarakat atas kinerja perangkat daerah (PTSP)	85 Indeks	88,79 Indeks	104%	Sangat Tinggi
1	Perencanaan, Pengggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan yang tersusun sesuai ketentuan	29 dokumen	29 dokumen	100%	Sangat Tinggi
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 dokumen	11 dokumen	100%	Sangat Tinggi
b	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18 Laporan	18 Laporan	100%	Sangat Tinggi
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai standar	29 Laporan	29 Laporan	100%	Sangat Tinggi
c	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Org/Bln	21 Org/Bln	100%	Sangat Tinggi
d	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	12 dokumen	100%	Sangat Tinggi
e	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	17 dokumen	17 dokumen	100%	Sangat Tinggi
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan hasil pengelolaan kepegawaian sesuai standar	1 Laporan	1 Laporan	100%	Sangat Tinggi

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSEN TASE CAPAIAN	KATEGORI
f	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 orang	40 orang	100%	Sangat Tinggi
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
g	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%	Sangat Tinggi
h	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	100%	Sangat Tinggi
i	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	100%	Sangat Tinggi
j	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	100%	Sangat Tinggi
k	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100%	Sangat Tinggi
l	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 dokumen	4 dokumen	100%	Sangat Tinggi
m	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	38 Laporan	127%	Sangat Tinggi
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan sesuai ketentuan (perpres pengadaan barjas dan RKBU)	25 unit	25 unit	100%	Sangat Tinggi
n	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	25 unit	25 unit	100%	Sangat Tinggi

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSEN TASE CAPAIAN	KATEGORI
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan penggunaan jasa penunjang urusan yang sesuai ketentuan	5 Laporan	5 Laporan	100%	Sangat Tinggi
o	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan	100%	Sangat Tinggi
p	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	100%	Sangat Tinggi
q	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	100%	Sangat Tinggi
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit BMD yang dipelihara sesuai standar	43 unit	43 unit	100%	Sangat Tinggi
r	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 unit	13 unit	100%	Sangat Tinggi
s	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 unit	30 unit	100%	Sangat Tinggi
II	PROGAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Cakupan Sinkronisasi Kebijakan Penanaman Modal	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
8	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kebijakan pemberian kemudahan, fasilitasi/ insentif di bidang penanaman modal	1 dokumen	0,8 dokumen	80%	Tinggi

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSEN TASE CAPAIAN	KATEGORI
t	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah dokumen bahan penyusunan kebijakan tentang kemudahan, fasilitas/Insentif di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Kabupaten Jumlah Peraturan Daerah/ Provinsi dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	1 dokumen 1 dokumen	1 dokumen 0,8 dokumen	100% 80%	Sangat Tinggi Tinggi
9	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah sistem peta potensi yang dikelola	1 sistem	1 sistem	100%	Sangat Tinggi
u	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peraturan daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	100%	Sangat Tinggi
v	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen tentang potensi dan atau kajian peluang investasi Kabupaten Jumlah peta potensi investasi dan peluang usaha Kabupaten/kota	1 dokumen 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen	100% 100%	Sangat Tinggi Sangat Tinggi
III	PROGAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	persentase peningkatan jumlah investor	10%	215,11%	2151%	Sangat Tinggi
10	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Penanaman Modal	1 kali	1 kali	100%	Sangat Tinggi

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSEN TASE CAPAIAN	KATEGORI
w	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah dokumen bahan penyusunan strategi promosi penanaman modal Daerah Jumlah Peraturan Daerah yang mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/ kota	1 dokumen 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen	100% 100%	Sangat Tinggi Sangat Tinggi
x	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal kabupaten/kota Jumlah kegiatan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Kabupaten	4 dokumen 4 kegiatan	4 dokumen 4 kegiatan	100% 100%	Sangat Tinggi Sangat Tinggi
IV	PROGAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelayanan perizinan pembangunan dan lingkungan yang sesuai standar pelayanan Persentase pelayanan perizinan perekonomian dan jasa usaha yang sesuai standar pelayanan	60 % 80 %	100 % 100 %	166,67% 125%	Sangat Tinggi Sangat Tinggi
11	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah perizinan terbit sesuai dengan standar pelayanan	12000 SK	14553 SK	121%	Sangat Tinggi

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSEN TASE CAPAIAN	KATEGORI
y	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	7500 Pelaku Usaha	9135 Pelaku Usaha	122%	Sangat Tinggi
z	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	20 Kegiatan Usaha	21 Kegiatan Usaha	105%	Sangat Tinggi
aa	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	12 Orang	12 Orang	100%	Sangat Tinggi
V	PROGAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	realisasi investasi yang dilaporkan	3,497 Trilyun	1,69 Trilyun	48%	Sangat Rendah
12	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM	500 Perusaha an	636 Perusaha an	127%	Sangat Tinggi
ab	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	350 Pelaku Usaha	401 Pelaku Usaha	115%	Sangat Tinggi
ac	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha yang Melakukan koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	200 Kegiatan Usaha	282 Kegiatan Usaha	141%	Sangat Tinggi

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSEN TASE CAPAIAN	KATEGORI
VI	PROGAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Cakupan Data dan Informasi Penanaman Modal yang dirilis	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
13	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sistem informasi yang dikelola	2 Aplikasi	2 Aplikasi	100%	Sangat Tinggi
ad	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	12 dokumen	12 dokumen	100%	Sangat Tinggi
VII	PROGAM PENGELOAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	cakupan fasilitasi perizinan pemanfaatan energi dan sumber daya mineral	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
14	Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan fasilitasi pemanfaatan langsung panas bumi	2 kali	2 kali	100%	Sangat Tinggi
ae	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	2 dokumen	2 dokumen	100%	Sangat Tinggi

3.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021,2022 dan 2023

Realisasi kinerja nilai evaluasi sakiip fluktuatif antara tahun 2021 s/d 2023. Realisasi pada tahun 2021 sebesar 61,85, tahun 2022 sebesar 78,28 dan tahun 2023 sebesar 71,70. Persentase capaian tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 26,56% dibandingkan tahun 2021 dan mengalami penurunan pada tahun 2023 sebesar 8,4%. Indikator kinerja yang kedua yaitu realisasi investasi, mengalami capaian yang fluktuatif antara tahun 2021 s/d 2023. Pada tahun 2021 terealisasi sebesar 11,97

Trilyun, tahun 2022 terealisasi sebesar 10,29 Trilyun dan tahun 2023 terealisasi sebesar 11,80 Trilyun. Pada tahun 2022, persentase capaian mengalami penurunan sebesar 14%, sementara pada tahun 2023 persentase capaian mengalami peningkatan sebesar 14,67 % dibandingkan tahun 2022. Indikator kinerja ketiga yaitu Nilai Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) terealisasi sebesar 60,97 dengan persentase capaian sebesar 73,46% pada tahun 2023 dan merupakan indikator penyesuaian dari indikator yang digunakan di tahun 2021 dan 2022. Pada tahun 2021 dan 2022 indikator yang digunakan adalah Persentase Pelayanan Perizinan sesuai standar pelayanan dengan capaian 85% dan 81,63%.

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021, 2022 dan 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2021			2022			2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Evaluasi SAKIP	75,8	61,85	81,60%	76	78,28	103%	76,5	71,70	93,7%
2	Meningkatnya iklim investasi	Realisasi Investasi	8,34 T	11,97 T	143,53%	8,79 T	10,29 T	117,06%	9,19 T	11,80 T	128,4%
3	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Persentase Pelayanan Perizinan sesuai standar pelayanan	52,33%	85,00%	162,43%	55,59%	81,63%	146,84%	-	-	-
		Nilai Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB)	-	-	-	-	-	-	83	60,97	73,46%

Kinerja Program tahun 2023 yang mengalami peningkatan dibanding tahun 2022 adalah Program Promosi Penanaman Modal meningkat sebesar 2576%, Program Pelayanan Penanaman Modal meningkat sebesar 38% dan 16%, dan Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal meningkat sebesar 15%. Sedangkan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota turun sebesar 10%. Peningkatan/penurunan capaian kinerja tahun 2022 dan 2023 selengkapnya disajikan dalam tabel dibawah ini.

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator	Kinerja 2022			Kinerja 2023			Peningkatan/ Penurunan
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Kepuasan Masyarakat atas kinerja perangkat daerah (PTSP)	83,5 indeks	95,23 indeks	114%	85 Indeks	88,79 Indeks	104%	-10%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan yang tersusun sesuai ketentuan	29 dok	29 dok	100%	29 dok	29 dok	100%	0%
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 dok	11 dok	100%	11 dok	11 dok	100%	0%
b	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18 Lap	18 Lap	100%	18 Lap	18 Lap	100%	0%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan pertanggung jawaban keuangan yang sesuai standar	29 lap	29 lap	100%	29 Lap	29 Lap	100%	0%
c	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Org/Bln	21 Org/Bln	81%	21 Org/Bln	21 Org/Bln	100%	19%
d	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pengelola keuangan	7 orang	7 orang	100%				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 dok	12 dok	100%	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator	Kinerja 2022			Kinerja 2023			Peningkatan/ Penurunan
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
e	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen pelaporan keuangan	29 dok	29 dok	100%				
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD				17 dok	17 dok	100%	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan hasil pengelolaan kepegawaian sesuai standar	-	-		1 Lap	1 Lap	100%	
f	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	-		40 orang	40 orang	100%	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan aset yang tersusun sesuai ketentuan	16 dok	16 dok	100%				
		Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar				100%	100%	100%	
g	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	2 jenis	2 jenis	100%				

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator	Kinerja 2022			Kinerja 2023			Peningkatan/ Penurunan
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	100%	
h	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis ATK	5 unit	5 unit	100%				
		Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor	37 jenis	37 jenis	100%				
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	100%	
i	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga	7 jenis	7 jenis	100%				
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	100%	
j	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat, tamu, dan kegiatan lain	2050 orang	305 orang	15%				
		Jumlah penyediaan makanan dan minuman harian	6 jenis	6 jenis	100%				

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator	Kinerja 2022			Kinerja 2023			Peningkatan/ Penurunan
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	100%	
k	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	6 jenis	6 jenis	100%				
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	100%	
l	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 jenis	1 jenis	100%				
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				4 dok	4 dok	100%	
m	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	50 kali	32 kali	64%				
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Lap	38 Lapn	127%	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan umum dan kepegawaian yang tersusun sesuai standar	33 dok	33 dok	100%				

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator	Kinerja 2022			Kinerja 2023			Peningkatan/ Penurunan
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
		Jumlah BMD yang diadakan sesuai ketentuan (perpres pengadaan barjas dan RKBU)				25 unit	25 unit	100%	
n	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor	72 unit	21 unit	29%				
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				25 unit	25 unit	100%	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan umum dan kepegawaian yang tersusun sesuai standar	16 dok	16 dok	100%				
		Jumlah laporan penggunaan jasa penunjang urusan yang sesuai ketentuan				5 Laporan	5 Laporan	100%	
o	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis jasa surat menyurat	2 jenis	2 jenis	100%				
		Jumlah Laporan penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Lap	2 Lap	100%	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator	Kinerja 2022			Kinerja 2023			Peningkatan/ Penurunan
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
p	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	3 jenis	3 jenis	100%				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Lap	1 Lap	100%	
q	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah PHD dan tenaga kontrak	3 orang	3 orang	100%				
		Jumlah Laporan penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Lap	2 Lap	100%	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarpras yang dikelola	57 unit	57 unit	100%				
		Jumlah unit BMD yang dipelihara sesuai standar				43 unit	43 unit	100%	
r	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	13 unit	13 unit	100%				
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara				13 unit	13 unit	100%	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator	Kinerja 2022			Kinerja 2023			Peningkatan/ Penurunan
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
		dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya							
s	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	44 unit	44 unit	100%				
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 unit	30 unit	100%	
II	PROGAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Cakupan Sinkronisasi Kebijakan Penanaman Modal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%
8	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kebijakan pemberian kemudahan, fasilitasi/ insentif di bidang penanaman modal	0	0	0	1 dok	0,8 dok	80%	80%
t	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah dokumen kebijakan Daerah mengenai pemberian fasilitasi/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang ditetapkan	0	0	0				

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator	Kinerja 2022			Kinerja 2023			Peningkatan/ Penurunan
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
		Jumlah dokumen bahan penyusunan kebijakan tentang kemudahan, fasilitas/Insentif di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Kabupaten Jumlah Peraturan Daerah/ Provinsi dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal				1 dok	1 dok	100%	
						1 dok	0,8 dok	80%	
9	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah sistem peta potensi yang dikelola	1 sistem	1 sistem	100%	1 sistem	1 sistem	100%	0%
u	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kebijakan tentang perencanaan Penanaman Modal	1 dok	1 dok	100%				
		Jumlah peraturan daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				1 dokumen	1 dokumen	100%	
v	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah data terbaru dalam peta potensi dan peluang investasi	2 data	2 data	100%				

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator	Kinerja 2022			Kinerja 2023			Peningkatan/ Penurunan
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
		Jumlah dokumen tentang potensi dan atau kajian peluang investasi Kabupaten				1 dok	1 dok	100%	
		Jumlah peta potensi investasi dan peluang usaha Kabupaten/ kota				1 dok	1 dok	100%	
III	PROGAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	persentase peningkatan jumlah investor	8%	-34%	-425%	10%	215,11%	2151%	2576%
10	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Penanaman Modal	1 kali	1 kali	100%	1 kali	1 kali	100%	0%
w	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal	1 dok	1 dok	100%				
		Jumlah dokumen bahan penyusunan strategi promosi penanaman modal Daerah				1 dok	1 dok	100%	
		Jumlah Peraturan Daerah yang mengatur Promosi Penanaman Modal				1 dok	1 dok	100%	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator	Kinerja 2022			Kinerja 2023			Peningkatan/ Penurunan
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
		Kewenangan Kabupaten/ kota							
x	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Promosi	3 jenis	2 jenis	67%				
		Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal kabupaten/kota				4 dok	4 dok	100%	
		Jumlah kegiatan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Kabupaten				4 kegiatan	4 kegiatan	100%	
IV	PROGAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelayanan perizinan pembangunan dan lingkungan yang sesuai standar pelayanan	55%	70,75%	129%	60 %	100 %	167%	38%
		Persentase pelayanan perizinan perekonomian dan jasa usaha yang sesuai standar pelayanan	80%	86,84%	109%	80 %	100 %	125%	16%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator	Kinerja 2022			Kinerja 2023			Peningkatan/ Penurunan
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
11	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah perizinan terbit sesuai dengan standar pelayanan	2392 SK	5424 SK	227%	12000 SK	14553 SK	121%	-105%
y	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Permohonan Perizinan dan non perizinan yang dilayani sesuai Standar Pelayanan	2392 permohonan	7309 permohonan	306%				
		Terbangunnya gedung MPP Tahap 2	1 gedung	1 gedung	100%				
		Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				7500 Pelaku Usaha	9135 Pelaku Usaha	122%	
z	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah perizinan yang memenuhi komitmen dasar dan operasional	50 izin	23 izin	46%				
		Jumlah data (dokumen) fasilitasi pelayanan perizinan pendukung program	26 dok	26 dok	100%				

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator	Kinerja 2022			Kinerja 2023			Peningkatan/ Penurunan
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal				20 Kegiatan Usaha	21 Kegiatan Usaha	105%	
aa	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah aduan masyarakat thdp pelayanan terpadu perijinan dan non perijinan yg telah ditindaklanjuti sampai selesai	5 pengaduan	6 pengaduan	120%				
		Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan				12 Orang	12 Orang	100%	
V	PROGAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	realisasi investasi yang dilaporkan	3,3 Trilyun	1,09 Trilyun	33%	3,497 Trilyun	1,69 Trilyun	48%	15%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator	Kinerja 2022			Kinerja 2023			Peningkatan/ Penurunan
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
12	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM	500 perusahaan	579 perusahaan	116%	500 Perusahaan	636 Perusahaan	127%	11%
ab	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang memahami penyampaian LKPM	270 perusahaan	341 perusahaan	126%				
		Jumlah dokumen laporan realisasi dan pembinaan investasi pendukung program	5 dok	5 dok	100%				
		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal				350 Pelaku Usaha	401 Pelaku Usaha	115%	
ac	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang terevaluasi	230 perusahaan	206 perusahaan	90%				
		Jumlah dokumen pengawasan Penanaman Modal Pendukung Program	17 dok	17 dok	100%				
		Jumlah Kegiatan Usaha yang Melakukan koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan				200 Kegiatan Usaha	282 Kegiatan Usaha	141%	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator	Kinerja 2022			Kinerja 2023			Peningkatan/ Penurunan
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
VI	PROGAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Cakupan Data dan Informasi Penanaman Modal yang dirilis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%
13	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sistem informasi yang dikelola	2 aplikasi	2 aplikasi	100%	2 Aplikasi	2 Aplikasi	100%	0%
ad	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah data penanaman modal yang terupdate	12 dok	12 dok	100%				
		Jumlah Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang dikelola	2 aplikasi	2 aplikasi	100%				
		Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				12 dok	12 dok	100%	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator	Kinerja 2022			Kinerja 2023			Peningkatan/ Penurunan
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
VII	PROGAM PENGELOAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	cakupan fasilitasi perizinan pemanfaatan energi dan sumber daya mineral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%
14	Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan fasilitasi pemanfaatan langsung panas bumi	2 kali	2 kali	100%	2 kali	2 kali	100%	0%
ae	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rekomendasi perizinan	2 dok	2 dok	100%				
		Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota				2 dok	2 dok	100%	

3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan akhir periode RPJMD

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode RPJMD

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI 2023	PERSENTASE CAPAIAN
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Evaluasi SAKIP	76,5	71,70	93,7%
2	Meningkatnya iklim investasi	Realisasi Investasi	9,19 T	11,8 T	128,4%
3	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Persentase Pelayanan Perizinan sesuai standar pelayanan	-	-	-
		Nilai Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB)	83	60,97	73,46%

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa persentase capaian sasaran strategis 1 sebesar 93,7%, digolongkan kategori “Sangat Tinggi” berdasarkan skala pengukuran Kinerja (Permendagri 86 Tahun 2017). Menurunnya persentase capaian pada sasaran strategis 1 disebabkan adanya sistem penilaian evaluasi SAKIP yang berbeda dari tahun sebelumnya. Penilaian SAKIP berpedoman pada Peraturan Menteri PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya. Evaluasi di tahun 2023 lebih menitikberatkan pada implementasi Akuntabilitas Kinerja. Meskipun nilai hasil evaluasi menurun tetapi masih dapat mempertahankan predikat BB dengan predikat kinerja “Sangat Baik”.

Capaian kinerja pada sasaran strategis 2 (dua) adalah pada indikator Realisasi Investasi dengan formulasi Penjumlahan Nilai Realisasi Investasi dilaporkan dan Realisasi Investasi yang belum dilaporkan dengan target pada akhir periode RPJMD sebesar 9,19 Trilyun, pada tahun 2023 dapat terealisasi sebesar 11,80 Trilyun. Artinya capaian kinerja pada Sasaran

Strategis Ke-2 adalah 128,4 % (Sangat Tinggi). Capaian ini didukung dengan adanya penggunaan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (OSS) sehingga mempermudah masyarakat mengurus perizinannya secara online dan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengurus legalitas usahanya. Realisasi investasi tercatat pada saat pelaku usaha mendaftarkan usahanya melalui OSS.

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis 3 adalah Nilai Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) dengan target pada akhir RPJMD sebesar 83, pada tahun 2023 telah terealisasi sebesar 60,97 (Kategori Baik), dengan tingkat capaian sebesar 73,46% (Sedang). DPMPTSP Kabupaten Kudus meraih peringkat 234 dari 415 Kabupaten di seluruh Indonesia. Capaian kinerja pada akhir periode RPJMD belum tercapai karena terdapat beberapa kendala terkait penerapan regulasi perizinan berusaha yang belum mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dan pelaksanaan kemudahan investasi yang belum optimal karena regulasi pemberian insentif/kemudahan berusaha belum tersusun.

Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada akhir periode RPJMD disajikan dalam tabel berikut:

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2023	Persentase Capaian
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Kepuasan Masyarakat atas kinerja perangkat daerah (PTSP)	85 Indeks	88,79 Indeks	104%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan yang tersusun sesuai ketentuan	29 dokumen	29 dokumen	100%
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 dokumen	11 dokumen	100%
b	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18 Laporan	18 Laporan	100%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai standar	29 Laporan	29 Laporan	100%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2023	Persentase Capaian
c	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Org/Bln	21 Org/Bln	100%
d	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	12 dokumen	100%
e	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	17 dokumen	17 dokumen	100%
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan hasil pengelolaan kepegawaian sesuai standar	1 Laporan	1 Laporan	100%
f	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 orang	40 orang	100%
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar	100%	100%	100%
g	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
h	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	100%
i	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	100%
j	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	100%
k	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100%
l	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 dokumen	4 dokumen	100%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2023	Persentase Capaian
m	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	38 Laporan	127%
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan sesuai ketentuan (perpres pengadaan barjas dan RKBU)	25 unit	25 unit	100%
n	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	25 unit	25 unit	100%
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan penggunaan jasa penunjang urusan yang sesuai ketentuan	5 Laporan	5 Laporan	100%
o	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan	100%
p	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	100%
q	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	100%
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit BMD yang dipelihara sesuai standar	43 unit	43 unit	100%
r	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 unit	13 unit	100%
s	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 unit	30 unit	100%
II	PROGAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Cakupan Sinkronisasi Kebijakan Penanaman Modal	100%	100%	100%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2023	Persentase Capaian
8	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kebijakan pemberian kemudahan, fasilitasi/ insentif di bidang penanaman modal	1 dokumen	0,8 dokumen	80%
t	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah dokumen bahan penyusunan kebijakan tentang kemudahan, fasilitas/Insentif di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Kabupaten Jumlah Peraturan Daerah/ Provinsi dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	1 dokumen 1 dokumen	1 dokumen 0,8 dokumen	100% 80%
9	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah sistem peta potensi yang dikelola	1 sistem	1 sistem	100%
u	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peraturan daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	100%
v	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen tentang potensi dan atau kajian peluang investasi Kabupaten Jumlah peta potensi investasi dan peluang usaha Kabupaten/ kota	1 dokumen 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen	100% 100%
III	PROGAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	persentase peningkatan jumlah investor	10 Persen	215,11 Persen	2151%
10	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Penanaman Modal	1 kali	1 kali	100%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2023	Persentase Capaian
w	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah dokumen bahan penyusunan strategi promosi penanaman modal Daerah Jumlah Peraturan Daerah yang mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/ kota	1 dokumen 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen	100% 100%
x	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal kabupaten/kota Jumlah kegiatan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Kabupaten	4 dokumen 4 kegiatan	4 dokumen 4 kegiatan	100% 100%
IV	PROGAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelayanan perizinan pembangunan dan lingkungan yang sesuai standar pelayanan Persentase pelayanan perizinan perekonomian dan jasa usaha yang sesuai standar pelayanan	60 % 80 %	100 % 100 %	166,67% 125%
11	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah perizinan terbit sesuai dengan standar pelayanan	12000 SK	14553 SK	121%
y	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	7500 Pelaku Usaha	9135 Pelaku Usaha	122%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2023	Persentase Capaian
z	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	20 Kegiatan Usaha	21 Kegiatan Usaha	105%
aa	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	12 Orang	12 Orang	100%
V	PROGAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	realisasi investasi yang dilaporkan	3,497 Trilyun	1,69 Trilyun	48%
12	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM	500 Perusahaan	636 Perusahaan	127%
ab	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	350 Pelaku Usaha	401 Pelaku Usaha	115%
ac	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha yang Melakukan koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	200 Kegiatan Usaha	282 Kegiatan Usaha	141%
VI	PROGAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Cakupan Data dan Informasi Penanaman Modal yang dirilis	100%	100%	100%
13	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sistem informasi yang dikelola	2 Aplikasi	2 Aplikasi	100%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2023	Persentase Capaian
ad	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	12 dokumen	12 dokumen	100%
VII	PROGAM PENGELOAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	cakupan fasilitasi perizinan pemanfaatan energi dan sumber daya mineral	100%	100%	100%
14	Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan fasilitasi pemanfaatan langsung panas bumi	2 kali	2 kali	100%
ae	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	2 dokumen	2 dokumen	100%

3.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Realisasi Investasi Nasional pada tahun 2023 sebesar Rp. 374,4 Trilyun, sedangkan realisasi investasi Jawa Tengah sebesar Rp. 41,29 Trilyun. Realisasi Investasi ini merupakan realisasi investasi yang tercatat dalam pelaporan LKPM sampai dengan Triwulan III Tahun 2023. Indikator Kinerja realisasi investasi di DPMPSTSP Kabupaten Kudus merupakan penjumlahan dari realisasi investasi yang dilaporkan dalam LKPM sebesar 1,69 Trilyun dan sisanya merupakan realisasi investasi yang belum dilaporkan.

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	REALISASI/RATA-RATA NASIONAL
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Evaluasi SAKIP	71,70	-

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	REALISASI/RATA-RATA NASIONAL
2	Meningkatnya iklim investasi	Realisasi Investasi	11,80 T	Nasional = Rp. 374,4 Trilyun (TW III) Jawa Tengah = Rp. 41,29 Trilyun (TW III) Kudus = Rp. 1,69 Trilyun (TW III)
3	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Nilai Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB)	60,97	-

3.1.5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif penyelesaian yang telah dilakukan.

Beberapa indikator kinerja di tahun 2023 telah berhasil terealisasi melampaui target, tetapi ada juga indikator kinerja yang tidak mencapai target. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif penyelesaiannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif penyelesaian yang telah dilakukan

NO.	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	TAHUN 2023		FAKTOR PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN	UPAYA PENYELESAIAN YANG TELAH DILAKUKAN
			TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7
I.	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENANAMAN MODAL					
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Perangkat Daerah (PTSP)	85 indek	88,79 indeks	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan perizinan di MPP yang selalu ditingkatkan secara bertahap dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kepuasan masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan Evaluasi pelayanan di MPP dengan seluruh petugas gerai yang mewakili instansinya masing-masing. Evaluasi telah dilaksanakan 2 kali dalam 1 tahun.
2.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Cakupan Sinkronisasi Kebijakan Penanaman Modal	100%	100%	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber Daya Manusia yang terbatas sehingga kinerja tidak dapat diselesaikan tepat waktu. • Penyusunan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dalam tahap koreksi dari Bagian Hukum. • Belum tersedianya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai acuan tentang Tata Ruang Investasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengajuan penambahan personil (tenaga kontrak) melalui nota dinas kepada Bupati. • Berkoordinasi dengan Bagian Hukum terkait tentang Penyusunan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal. • Berkoordinasi dengan Dinas PUPR sebagai penyusun Perbup tentang RDTR.

NO.	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	TAHUN 2023		FAKTOR PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN	UPAYA PENYELESAIAN YANG TELAH DILAKUKAN
			TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7
					<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan SDM yang kompeten terkait tata ruang belum mencukupi. • Belum tersedianya program prioritas dalam roadmap pembangunan di Kabupaten Kudus. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan kajian potensi dan peluang investasi berdasarkan data potensi dari OPD teknis.
3.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	persentase peningkatan jumlah investor	10%	215,11%	<ul style="list-style-type: none"> • Belum tersedianya SDM yang kompeten dalam pelaksanaan promosi investasi. • Keterbatasan Informasi tentang event pameran investasi. • Keterbatasan anggaran untuk kegiatan pameran. • Rendahnya semangat inovasi dalam kegiatan promosi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengajuan penambahan personil (tenaga kontrak) melalui nota dinas kepada Bupati. • Menambah jumlah kegiatan promosi dengan pembuatan video profil investasi Kabupaten Kudus. • Melakukan koordinasi dengan DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah mengenai informasi pelaksanaan event pameran investasi. • Menciptakan inovasi dalam bidang promosi dengan pengembangan aplikasi Pro InvestKu.
4.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelayanan perizinan pembangunan dan lingkungan yang	60%	100%	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan tentang SP dan SOP yang mendasarkan kepada 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Perbup pendelegasian kewenangan

NO.	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	TAHUN 2023		FAKTOR PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN	UPAYA PENYELESAIAN YANG TELAH DILAKUKAN
			TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7
		sesuai dengan Standar pelayanan			Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 telah disusun tetapi masih dalam tahap koreksi di Bagian Hukum.	perizinan berusaha dan non berusaha, penyusunan SP dan SOP telah dilakukan tetapi masih dalam tahap koreksi di Bagian Hukum.
		Persentase pelayanan perizinan perekonomian dan jasa usaha yang sesuai dengan Standar pelayanan	80%	100%	<ul style="list-style-type: none"> • Masih terdapat perizinan dan non perizinan yang ditangani secara manual (belum terakomodir di OSS maupun SIPTO). • Keterbatasan SDM yang kompeten di bidang pelayanan perizinan. • Koordinasi dengan OPD terkait pemegang hak akses perizinan yang belum optimal. 	<ul style="list-style-type: none"> • Meng-online-kan Perizinan dan non perizinan yang masih dikelola secara manual. • Pelaksanaan Pelatihan Peningkatan kompetensi di bidang perizinan kepada seluruh ASN, Non ASN dan ASN di OPD lain sebagai pemegang hak akses OSS. • Meningkatkan koordinasi dengan Dinas teknis agar rekomendasi dapat diselesaikan tepat waktu melalui rapat tim teknis.

NO.	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	TAHUN 2023		FAKTOR PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN	UPAYA PENYELESAIAN YANG TELAH DILAKUKAN
			TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7
5.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Realisasi investasi yang terlaporkan	3,497 Trilyun	1,69 Trilyun	<ul style="list-style-type: none"> • Realisasi investasi terlaporkan merupakan penjumlahan dari realisasi investasi skala mikro (TW IV) ditambah Realisasi LKPM (TW III) sehingga nilainya belum maksimal karena Realisasi LKPM TW IV baru akan release di akhir Januari 2024. • Pelaksanaan Monev Pengawasan belum maksimal karena keterbatasan SDM dan Sarpras kendaraan dinas. • Belum optimalnya koordinasi dengan OPD teknis pemegang hak akses pengawasan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Membuka pelayanan di gerai dpmpstsp non OSS yang melayani pendampingan dan konsultasi LKPM, melaksanakan Sosialisasi pelaporan LKPM dan dan bimtek penyelesaian permasalahan. • Mengoptimalkan kegiatan pendampingan pelaporan LKPM ke perusahaan dengan SDM dan Sarpras yang tersedia. • Mengusulkan penambahan kendaraan dinas operasional/lapangan. • Koordinasi dengan OPD teknis pemegang hak akses pengawasan melalui rapat koordinasi dan evaluasi pengawasan.
6.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Cakupan Data dan Informasi Penanaman Modal yang dirilis	100%	100%	<ul style="list-style-type: none"> • Data perizinan dan investasi masih dikelola masing-masing bidang sehingga belum dapat tersaji data secara lengkap menyeluruh 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan penyusunan laporan perizinan dan laporan investasi di masing-masing bidang akan tetapi dokumen pengelolaan data sudah tersusun menjadi 1 dokumen tersendiri.

NO.	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	TAHUN 2023		FAKTOR PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN	UPAYA PENYELESAIAN YANG TELAH DILAKUKAN
			TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7
II	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					
1	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	cakupan fasilitasi perizinan pemanfaatan energi dan sumber daya mineral	100%	100%	<ul style="list-style-type: none"> • Belum ada usaha untuk energy baru terbarukan yang membutuhkan fasilitasi legalitas usaha di Kabupaten Kudus. 	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan koordinasi ke daerah yang sudah memiliki kajian panas bumi.

3.1.6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Perbandingan tingkat efisiensi Pada tahun 2022 dan 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus dapat dilihat pada tabel

Tabel 3.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Capaian Kinerja (%)		Serapan Anggaran (%)		Tingkat Efisiensi (%)	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Evaluasi SAKIP	103,0	93,7	80,73	92,4	22,3	1,3
2	Meningkatnya iklim investasi	Realisasi Investasi	117,07	128,4	78,85	82,5	38,9	45,9
3	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Persentase Pelayanan Perizinan sesuai standar pelayanan	170,23	-	90,99	-	79,2	-
		Nilai Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB)	-	73,46	-	94,5	-	-21

Perbandingan tingkat efisiensi pada indikator kinerja nilai evaluasi sakip mengalami penurunan dari 22,3% menjadi 1,3%. Pada indikator kinerja realisasi investasi tingkat efisiensi mengalami peningkatan dari 38,9% menjadi 45,9%, sedangkan indikator kinerja Nilai Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena indikator kinerja yang digunakan berbeda. Nilai Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) memiliki tingkat efisiensi -21% .

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dari indikator kinerja utama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus antara lain :

1. Meningkatkan implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah dengan melakukan penertiban administrasi dalam tahapan perencanaan, pelaporan dan evaluasi kinerja di semua bidang.

2. Meningkatkan capaian kinerja indikator realisasi investasi dengan cara optimalisasi pendampingan kegiatan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) baik melalui sosialisasi maupun pelayanan konsultasi LKPM di gerai DPMPTSP.
3. Meningkatkan capaian kinerja indikator Nilai Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) dengan cara optimalisasi penerapan standar pelayanan (SP) dan SOP perizinan berusaha serta penyesuaian regulasi berdasarkan PP No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

3.1.7. Analisis Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Pada tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus didukung oleh 7 Program. Pencapaian kinerja dari sasaran strategis 1 yaitu meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah, didukung oleh pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator	Kinerja 2023		
			Target	Realisasi	%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Indek Kepuasan Masyarakat atas kinerja perangkat daerah (PTSP)	85 Indeks	88,79 Indeks	104%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan yang tersusun sesuai ketentuan	29 dokumen	29 dokumen	100%
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 dokumen	11 dokumen	100%
b	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18 Laporan	18 Laporan	100%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai standar	29 Laporan	29 Laporan	100%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator	Kinerja 2023		
			Target	Realisasi	%
c	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Org/Bln	21 Org/Bln	100%
d	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	12 dokumen	100%
e	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	17 dokumen	17 dokumen	100%
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan hasil pengelolaan kepegawaian sesuai standar	1 Laporan	1 Laporan	100%
f	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 orang	40 orang	100%
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar	100%	100%	100%
g	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
h	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	100%
i	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	100%
j	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	100%
k	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100%
l	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 dokumen	4 dokumen	100%
m	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	30 Laporan	38 Laporan	127%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator	Kinerja 2023		
			Target	Realisasi	%
		Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan sesuai ketentuan (perpres pengadaan barjas dan RKBU)	25 unit	25 unit	100%
n	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	25 unit	25 unit	100%
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan penggunaan jasa penunjang urusan yang sesuai ketentuan	5 Laporan	5 Laporan	100%
o	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan	100%
p	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	100%
q	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	100%
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit BMD yang dipelihara sesuai standar	43 unit	43 unit	100%
r	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 unit	13 unit	100%
s	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 unit	30 unit	100%

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terealisasi 88,79 indeks dari target 85 indeks dengan capaian sebesar 104%. Program ini memiliki 7 kegiatan dan 19 sub kegiatan dengan capaian kinerja seluruhnya 100%.

Pencapaian kinerja dari sasaran strategis 2 yaitu Meningkatnya Iklim Investasi didukung oleh pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator	Kinerja 2023		
			Target	Realisasi	%
II	PROGAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Cakupan Sinkronisasi Kebijakan Penanaman Modal	100%	100%	100%
8	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kebijakan pemberian kemudahan, fasilitasi/ insentif di bidang penanaman modal	1 dokumen	0,8 dokumen	80%
t	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah dokumen bahan penyusunan kebijakan tentang kemudahan, fasilitas/Insentif di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Kabupaten	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Jumlah Peraturan Daerah/ Provinsi dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	1 dokumen	0,8 dokumen	80%
9	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah sistem peta potensi yang dikelola	1 sistem	1 sistem	100%
u	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peraturan daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	100%
v	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen tentang potensi dan atau kajian peluang investasi Kabupaten	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Jumlah peta potensi investasi dan peluang usaha Kabupaten/ kota	1 dokumen	1 dokumen	100%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator	Kinerja 2023		
			Target	Realisasi	%
III	PROGAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	persentase peningkatan jumlah investor	10 Persen	215,11 Persen	2151%
10	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Penanaman Modal	1 kali	1 kali	100%
w	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah dokumen bahan penyusunan strategi promosi penanaman modal Daerah	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Jumlah Peraturan Daerah yang mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/ kota	1 dokumen	1 dokumen	100%
x	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal kabupaten/kota	4 dokumen	4 dokumen	100%
		Jumlah kegiatan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Kabupaten	4 kegiatan	4 kegiatan	100%
V	PROGAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	realisasi investasi yang dilaporkan	3,497 Trilyun	1,69 Trilyun	48%
12	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM	500 Perusahaan	636 Perusahaan	127%
ab	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	350 Pelaku Usaha	401 Pelaku Usaha	115%
ac	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha yang Melakukan koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	200 Kegiatan Usaha	282 Kegiatan Usaha	141%

Program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target kinerja dari sasaran strategis 2: Meningkatnya iklim investasi terdiri dari:

1. Program Pengembangan iklim penanaman modal dengan indikator cakupan sinkronisasi kebijakan penanaman modal terealisasi 100% dengan target dan capaian 100%. Kegiatan yang dilaksanakan di program ini adalah penyusunan peraturan tentang pemberian fasilitasi/insentif kemudahan penanaman modal dengan capaian 80% dan penyusunan kajian potensi investasi dengan capaian 100%. Penyusunan Peraturan Bupati tentang pemberian fasilitasi/insentif kemudahan penanaman modal masih dalam tahap koreksi di Bagian Hukum dan akan disempurnakan menjadi Peraturan Bupati di tahun 2024.
2. Program Promosi Penanaman Modal dengan indikator persentase peningkatan jumlah investor terealisasi 215,11% dari targetnya 10%. Prosentase peningkatan jumlah investor yang sangat tinggi disebabkan meningkatnya minat masyarakat untuk berinvestasi/membuka lapangan usaha dan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengurus legalitas usahanya. Jumlah investor di tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022. Jumlah investor tahun 2023 sebanyak 9135 sedangkan jumlah investor tahun 2022 sebanyak 2899. Program ini terdiri dari 1 kegiatan yaitu kegiatan penyelenggaraan promosi yang terealisasi 1 kali dengan capaian 100%. Promosi yang dilaksanakan yaitu mengikuti Central Java Investment Business Forum (CJIBF) di Semarang. Sedangkan sub kegiatan yang dilaksanakan ada 2 yaitu penyusunan dokumen strategi promosi yang terealisasi 1 dokumen dengan capaian 100% dan kegiatan pelaksanaan promosi penanaman modal yang terealisasi 4 kegiatan (100%). Pelaksanaan promosi yang dilakukan berupa publikasi di surat kabar yang terdiri dari iklan hitam putih dan berwarna, pembuatan leaflet perizinan, kegiatan mengikuti CJIBF dan pembuatan video profil investasi Kabupaten Kudus.
3. Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal dengan indikator realisasi investasi yang dilaporkan hanya terealisasi 1,69 Trilyun dari targetnya 3,497 Trilyun (capaian 48,33%). Realisasi investasi merupakan jumlah investasi dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) ditambah dengan realisasi investasi

perusahaan skala mikro. Pendampingan ke perusahaan yang belum optimal menyebabkan jumlah perusahaan yang wajib LKPM belum menyampaikan laporannya sehingga realisasi investasinya belum tercatat. Program ini terdiri dari 1 kegiatan yaitu pengendalian pelaksanaan penanaman modal dengan realisasi 636 perusahaan yang melaporkan LKPM dari targetnya 500 perusahaan (capaian 127%). Sedangkan kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari 2 sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal berupa sosialisasi tentang LKPM dengan capaian 115% dan sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal berupa kunjungan lapangan ke perusahaan dalam rangka pengawasan pelaksanaan penanaman modal dengan realisasi 282 perusahaan dari targetnya 200 perusahaan (capaian 141%).

Pencapaian kinerja dari sasaran strategis 3 yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan didukung oleh pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator	Kinerja 2023		
			Target	Realisasi	%
IV	PROGAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelayanan perizinan pembangunan dan lingkungan yang sesuai standar pelayanan	60 %	100 %	166,67%
		Persentase pelayanan perizinan perekonomian dan jasa usaha yang sesuai standar pelayanan	80 %	100 %	125%
11	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah perizinan terbit sesuai dengan standar pelayanan	12000 SK	14553 SK	121%
y	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan Berusaha	7500 Pelaku Usaha	9135 Pelaku Usaha	122%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator	Kinerja 2023		
			Target	Realisasi	%
	Terintegrasi secara Elektronik	Terintegrasi Secara Elektronik			
z	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	20 Kegiatan Usaha	21 Kegiatan Usaha	105%
aa	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	12 Orang	12 Orang	100%
VI	PROGAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Cakupan Data dan Informasi Penanaman Modal yang dirilis	100%	100%	100%
13	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sistem informasi yang dikelola	2 Aplikasi	2 Aplikasi	100%
ad	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	12 dokumen	12 dokumen	100%
VII	PROGAM PENGELOAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	cakupan fasilitasi perizinan pemanfaatan energi dan sumber daya mineral	100%	100%	100%
14	Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan fasilitasi pemanfaatan langsung panas bumi	2 kali	2 kali	100%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator	Kinerja 2023		
			Target	Realisasi	%
ae	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	2 dokumen	2 dokumen	100%

Program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target kinerja dari sasaran strategis 3: Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan antara lain:

1. Program Pelayanan Penanaman Modal dengan 2 indikator antara lain:

- a. Persentase pelayanan perizinan pembangunan dan lingkungan yang sesuai standar pelayanan dengan realisasi 100% dari targetnya 60% (capaian 166,67%)
- b. Persentase pelayanan perizinan perekonomian dan jasa usaha terealisasi 100% dari targetnya 80% (capaian 125%)

Perizinan dan non perizinan yang dilayani di DPMPTSP saat ini sebagian besar sudah menggunakan OSS dimana kegiatan usaha dengan risiko rendah akan terbit Nomor Induk Berusaha (NIB) secara otomatis. Kegiatan usaha yang belum terakomodir di OSS dilayani melalui SIPT-Online dan manual.

Program ini terdiri dari 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan. Capaian dari kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan adalah 121% dan capaian 3 sub kegiatan memiliki capaian diatas 100%.

2. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan indikator Cakupan data dan system informasi penanaman modal yang dirilis ke publik dengan capaian 100%. Data yang ditampilkan ke system (website DPMPTSP) antara lain data perizinan, data investasi, data LKPM, data pengaduan dan data layanan di MPP. Program ini terdiri dari 1 kegiatan yaitu pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi dengan indikator jumlah system informasi yang dikelola teralisasi 2 aplikasi yaitu website DPMPTSP dan system informasi perizinan terpadu online (SIPT-Online) dengan capaian 100%.

3. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dengan indikator cakupan fasilitasi perizinan energi dan sumber daya mineral dengan capaian 100%. Program ini terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan. Kegiatan penatausahaan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/kota dengan indikator jumlah koordinasi dan fasilitasi pemanfaatan langsung panas bumi terealisasi sesuai target yaitu 2 kali koordinasi sehingga capaiannya 100%. Koordinasi dilakukan ke DPMPTSP Propinsi Jawa Tengah dan DPMPTSP Kab. Tegal. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah, Pelayanan perizinan pemanfaatan energi panas bumi yang menjadi kewenangan DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor: 2518 k/30/MEM/2012 tentang Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi di Daerah Gunung Lawu, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, Dan Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur, sedangkan Kabupaten Kudus tidak masuk dalam penetapan WKP berdasarkan keputusan menteri ESDM sampai dengan saat ini.

3.3 Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, DPMPTSP Kabupaten Kudus pada Tahun Anggaran 2023 didukung dengan anggaran APBD Kabupaten Kudus dan DAK non fisik sebesar Rp. 6.719.437.284,-. Selanjutnya di dalam perubahan APBD Tahun 2023, terjadi perubahan anggaran dengan total anggaran turun menjadi Rp. 5.205.123.652,- Penurunan anggaran tersebut adalah pengurangan belanja di sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN.

Rincian penggunaan anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

3.3.1 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub kegiatan pendukung sasaran 1:

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator	Anggaran Perubahan 2023		
			Pagu Anggaran	Realisasi	%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Indek Kepuasan Masyarakat atas kinerja perangkat daerah (PTSP)	4.396.186.460	4.061.678.098	92,39%
1	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan yang tersusun sesuai ketentuan	3.194.850	3.157.500	98,83%
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.597.425	1.569.500	98,25%
b	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.597.425	1.588.000	99,41%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai standar	3.596.383.500	3.311.409.290	92,08%
c	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3.553.506.000	3.268.552.740	91,98%
d	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	41.280.000	41.280.000	100,00%
e	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.597.500	1.576.550	98,69%
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan hasil pengelolaan kepegawaian sesuai standar	48.599.780	48.560.000	99,92%
f	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	48.599.780	48.560.000	99,92%
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar	229.633.330	216.083.452	94,10%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator	Anggaran Perubahan 2023		
			Pagu Anggaran	Realisasi	%
g	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3.691.000	3.611.500	97,85%
h	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40.929.000	40.685.000	99,40%
i	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	14.460.000	10.480.600	72,48%
j	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	44.688.230	38.777.500	86,77%
k	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	28.721.100	25.830.700	89,94%
l	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan yang Disediakan	8.400.000	8.310.000	98,93%
m	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	88.744.000	88.388.152	99,60%
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan sesuai ketentuan (perpres pengadaan barjas dan RKBU)	141.558.000	137.726.500	97,29%
n	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	141.558.000	137.726.500	97,29%
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan penggunaan jasa penunjang urusan yang sesuai ketentuan	201.326.000	188.893.546	93,82%
o	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	3.824.000	76,48%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator	Anggaran Perubahan 2023		
			Pagu Anggaran	Realisasi	%
p	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	85.250.000	74.220.000	87,06%
q	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	111.076.000	110.849.546	99,80%
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit BMD yang dipelihara sesuai standar	175.491.000	155.847.810	88,81%
r	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	140.994.000	127.999.310	90,78%
s	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	34.497.000	27.848.500	80,73%

Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub kegiatan pendukung sasaran 2:

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator	Anggaran Perubahan 2023		
			Pagu Anggaran	Realisasi	%
II	PROGAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Cakupan Sinkronisasi Kebijakan Penanaman Modal	63.449.475	57.599.430	90,78%
8	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kebijakan pemberian kemudahan, fasilitasi/ insentif di bidang penanaman modal	6.551.250	4.300.000	65,64%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator	Anggaran Perubahan 2023		
			Pagu Anggaran	Realisasi	%
t	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah dokumen bahan penyusunan kebijakan tentang kemudahan, fasilitas /Insentif di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Kabupaten Jumlah Peraturan Daerah/ Provinsi dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	6.551.250	4.300.000	65,64%
9	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah sistem peta potensi yang dikelola	56.898.225	53.299.430	93,68%
u	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peraturan daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten /Kota	2.898.700	1.460.000	50,37%
v	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen tentang potensi dan atau kajian peluang investasi Kabupaten Jumlah peta potensi investasi dan peluang usaha Kabupaten/ kota	53.999.525	51.839.430	96,00%
III	PROGAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	persentase peningkatan jumlah investor	152.448.765	143.448.090	94,10%
10	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Penanaman Modal	152.448.765	143.448.090	94,10%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator	Anggaran Perubahan 2023		
			Pagu Anggaran	Realisasi	%
w	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah dokumen bahan penyusunan strategi promosi penanaman modal Daerah Jumlah Peraturan Daerah yang mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/ kota	59.873.465	58.513.090	97,73%
x	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal kabupaten/kota Jumlah kegiatan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Kabupaten	92.575.300	84.935.000	91,75%
V	PROGAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	realisasi investasi yang dilaporkan	368.868.800	281.422.656	76,29%
12	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM	368.868.800	281.422.656	76,29%
ab	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	265.419.800	228.904.156	86,24%
ac	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha yang Melakukan koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	103.449.000	52.518.500	50,77%

Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub kegiatan pendukung sasaran
3:

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator	Anggaran Perubahan 2023		
			Pagu Anggaran	Realisasi	%
IV	PROGAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelayanan perizinan pembangunan dan lingkungan yang sesuai standar pelayanan Persentase pelayanan perizinan perekonomian dan jasa usaha yang sesuai standar pelayanan	137.678.982	28.514.900	93,34%
11	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah perizinan terbit sesuai dengan standar pelayanan	137.678.982	128.514.900	93,34%
y	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	127.181.850	124.594.900	97,97%
z	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	3.000.000	3.000.000	100,00%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator	Anggaran Perubahan 2023		
			Pagu Anggaran	Realisasi	%
aa	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	7.497.132	920.000	12,27%
VI	PROGAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Cakupan Data dan Informasi Penanaman Modal yang dirilis	84.541.170	81.897.715	96,87%
13	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sistem informasi yang dikelola	84.541.170	81.897.715	96,87%
ad	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	84.541.170	81.897.715	96,87%
VII	PROGAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	cakupan fasilitasi perizinan pemanfaatan energi dan sumber daya mineral	1.950.000	1.480.000	75,90%
14	Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan fasilitasi pemanfaatan langsung panas bumi	1.950.000	1.480.000	75,90%
ae	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten /Kota	1.950.000	1.480.000	75,90%

Dilihat dari laporan realisasi penyerapan anggaran APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023, realisasi Belanja DPMPTSP Kabupaten Kudus sebesar Rp.4.756.040.889,- dari total anggarannya sebesar Rp. 5.205.123.652,- (91,37%) dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai dengan anggaran Rp. 3.627.821.000,- terealisasi sebesar Rp. 3.342.867.740,- (92,14%)
2. Belanja Barang dan Jasa dengan anggaran Rp. 1.454.174.652,- terealisasi sebesar Rp. 1.293.545.149,- (88,95%)
3. Belanja Modal dengan anggaran Rp. 123.128.000,- terealisasi sebesar Rp. 119.628.000,- (97,15%)

3.4 Efisiensi Anggaran

Anggaran Perubahan APBD tahun 2023 yang dilaksanakan DPMPTSP Kabupaten Kudus sebesar Rp. 5.205.123.652,- dan terealisasi sebesar Rp.4.756.040.889,- dengan capaian 91,37%. Dari realisasi anggaran tersebut, efisiensi anggaran DPMPTSP Kabupaten Kudus Tahun 2023 sebesar 8,63% , dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	EFISIENSI (%)
Belanja Pegawai	3.627.821.000	3.342.867.740	92,14	7,86
Belanja Barang dan Jasa	1.454.174.652	1.293.545.149	88,95	11,05
Belanja Modal	123.128.000	119.628.000	97,15	2,85
Total Belanja	5.205.123.652	4.756.040.889	91,37	8,63

Efisiensi anggaran DPMPTSP Kabupaten Kudus Tahun 2023 apabila dilihat berdasarkan Program, kegiatan dan sub kegiatan adalah sebagai berikut:

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator	Kinerja 2023			Anggaran Perubahan 2023			Efisiensi (%)
			Target	Realisasi	%	Pagu Anggaran	Realisasi	%	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Kepuasan Masyarakat atas kinerja perangkat daerah (PTSP)	85 Indeks	88,79 Indeks	104%	4.396.186.460	4.061.678.098	92,39%	12,07%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan yang tersusun sesuai ketentuan	29 dokumen	29 dokumen	100%	3.194.850	3.157.500	98,83%	1,17%
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 dokumen	11 dokumen	100%	1.597.425	1.569.500	98,25%	1,75%
b	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18 Laporan	18 Laporan	100%	1.597.425	1.588.000	99,41%	0,59%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai standar	29 Laporan	29 Laporan	100%	3.596.383.500	3.311.409.290	92,08%	7,92%
c	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Org/Bln	21 Org/Bln	100%	3.553.506.000	3.268.552.740	91,98%	8,02%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator	Kinerja 2023			Anggaran Perubahan 2023			Efisiensi (%)
			Target	Realisasi	%	Pagu Anggaran	Realisasi	%	
d	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	12 dokumen	100%	41.280.000	41.280.000	100,00%	0,00%
e	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	17 dokumen	17 dokumen	100%	1.597.500	1.576.550	98,69%	1,31%
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan hasil pengelolaan kepegawaian sesuai standar	1 Laporan	1 Laporan	100%	48.599.780	48.560.000	99,92%	0,08%
f	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 orang	40 orang	100%	48.599.780	48.560.000	99,92%	0,08%
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar	100%	100%	100%	229.633.330	216.083.452	94,10%	5,90%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator	Kinerja 2023			Anggaran Perubahan 2023			Efisiensi (%)
			Target	Realisasi	%	Pagu Anggaran	Realisasi	%	
g	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%	3.691.000	3.611.500	97,85%	2,15%
h	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	100%	40.929.000	40.685.000	99,40%	0,60%
i	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	100%	14.460.000	10.480.600	72,48%	27,52%
j	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	100%	44.688.230	38.777.500	86,77%	13,23%
k	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100%	28.721.100	25.830.700	89,94%	10,06%
l	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 dokumen	4 dokumen	100%	8.400.000	8.310.000	98,93%	1,07%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator	Kinerja 2023			Anggaran Perubahan 2023			Efisiensi (%)
			Target	Realisasi	%	Pagu Anggaran	Realisasi	%	
m	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	38 Laporan	127%	88.744.000	88.388.152	99,60%	27,07%
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan sesuai ketentuan (perpres pengadaan barjas dan RKBU)	25 unit	25 unit	100%	141.558.000	137.726.500	97,29%	2,71%
n	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	25 unit	25 unit	100%	141.558.000	137.726.500	97,29%	2,71%
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan penggunaan jasa penunjang urusan yang sesuai ketentuan	5 Laporan	5 Laporan	100%	201.326.000	188.893.546	93,82%	6,18%
o	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan	100%	5.000.000	3.824.000	76,48%	23,52%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator	Kinerja 2023			Anggaran Perubahan 2023			Efisiensi (%)
			Target	Realisasi	%	Pagu Anggaran	Realisasi	%	
p	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	100%	85.250.000	74.220.000	87,06%	12,94%
q	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	100%	111.076.000	110.849.546	99,80%	0,20%
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit BMD yang dipelihara sesuai standar	43 unit	43 unit	100%	175.491.000	155.847.810	88,81%	11,19%
r	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 unit	13 unit	100%	140.994.000	127.999.310	90,78%	9,22%
s	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 unit	30 unit	100%	34.497.000	27.848.500	80,73%	19,27%
II	PROGAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Cakupan Sinkronisasi Kebijakan Penanaman Modal	100%	100%	100%	63.449.475	57.599.430	90,78%	9,22%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator	Kinerja 2023			Anggaran Perubahan 2023			Efisiensi (%)
			Target	Realisasi	%	Pagu Anggaran	Realisasi	%	
8	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kebijakan pemberian kemudahan, fasilitasi/ insentif di bidang penanaman modal	1 dokumen	0,8 dokumen	80%	6.551.250	4.300.000	65,64%	14,36%
t	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah dokumen bahan penyusunan kebijakan tentang kemudahan, fasilitas/Insentif di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Kabupaten Jumlah Peraturan Daerah/ Provinsi dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	1 dokumen 1 dokumen	1 dokumen 0,8 dokumen	100% 80%	6.551.250	4.300.000	65,64%	24%
9	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah sistem peta potensi yang dikelola	1 sistem	1 sistem	100%	56.898.225	53.299.430	93,68%	6,32%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator	Kinerja 2023			Anggaran Perubahan 2023			Efisiensi (%)
			Target	Realisasi	%	Pagu Anggaran	Realisasi	%	
u	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peraturan daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	100%	2.898.700	1.460.000	50,37%	49,63%
v	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen tentang potensi dan atau kajian peluang investasi Kabupaten	1 dokumen	1 dokumen	100%	53.999.525	51.839.430	96,00%	4,00%
		Jumlah peta potensi investasi dan peluang usaha Kabupaten/ kota	1 dokumen	1 dokumen	100%				
III	PROGAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	persentase peningkatan jumlah investor	10 Persen	215,11 %	2151%	152.448.765	143.448.090	94,10%	2057,00%
10	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Penanaman Modal	1 kali	1 kali	100%	152.448.765	143.448.090	94,10%	5,90%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator	Kinerja 2023			Anggaran Perubahan 2023			Efisiensi (%)
			Target	Realisasi	%	Pagu Anggaran	Realisasi	%	
w	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah dokumen bahan penyusunan strategi promosi penanaman modal Daerah	1 dokumen	1 dokumen	100%	59.873.465	58.513.090	97,73%	2,27%
		Jumlah Peraturan Daerah yang mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/ kota	1 dokumen	1 dokumen	100%				
x	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal kabupaten/kota	4 dokumen	4 dokumen	100%	92.575.300	84.935.000	91,75%	8,25%
		Jumlah kegiatan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Kabupaten	4 kegiatan	4 kegiatan	100%				

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator	Kinerja 2023			Anggaran Perubahan 2023			Efisiensi (%)
			Target	Realisasi	%	Pagu Anggaran	Realisasi	%	
IV	PROGAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelayanan perizinan pembangunan dan lingkungan yang sesuai standar pelayanan	60 %	100 %	166,67%	137.678.982	128.514.900	93,34%	52,50%
		Persentase pelayanan perizinan perekonomian dan jasa usaha yang sesuai standar pelayanan	80 %	100 %	125%				
11	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah perizinan terbit sesuai dengan standar pelayanan	12000 SK	14553 SK	121%	137.678.982	128.514.900	93,34%	27,93%
y	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan Berusaha	7500 Pelaku Usaha	9135 Pelaku Usaha	122%	127.181.850	124.594.900	97,97%	23,83%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator	Kinerja 2023			Anggaran Perubahan 2023			Efisiensi (%)
			Target	Realisasi	%	Pagu Anggaran	Realisasi	%	
	Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Terintegrasi Secara Elektronik							
z	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	20 Kegiatan Usaha	21 Kegiatan Usaha	105%	3.000.000	3.000.000	100,00%	5,00%
aa	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	12 Orang	12 Orang	100%	7.497.132	920.000	12,27%	87,73%
V	PROGAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	realisasi investasi yang dilaporkan	3,497 Trilyun	1,69 Trilyun	48%	368.868.800	281.422.656	76,29%	-27,97%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator	Kinerja 2023			Anggaran Perubahan 2023			Efisiensi (%)
			Target	Realisasi	%	Pagu Anggaran	Realisasi	%	
12	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM	500 Perusahaan	636 Perusahaan	127%	368.868.800	281.422.656	76,29%	50,91%
ab	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	350 Pelaku Usaha	401 Pelaku Usaha	115%	265.419.800	228.904.156	86,24%	28,33%
ac	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha yang Melakukan koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	200 Kegiatan Usaha	282 Kegiatan Usaha	141%	103.449.000	52.518.500	50,77%	90,23%
VI	PROGAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Cakupan Data dan Informasi Penanaman Modal yang dirilis	100%	100%	100%	84.541.170	81.897.715	96,87%	3,13%
13	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sistem informasi yang dikelola	2 Aplikasi	2 Aplikasi	100%	84.541.170	81.897.715	96,87%	3,13%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator	Kinerja 2023			Anggaran Perubahan 2023			Efisiensi (%)
			Target	Realisasi	%	Pagu Anggaran	Realisasi	%	
ad	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	12 dokumen	12 dokumen	100%	84.541.170	81.897.715	96,87%	3,13%
VII	PROGAM PENGELOAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	cakupan fasilitasi perizinan pemanfaatan energi dan sumber daya mineral	100%	100%	100%	1.950.000	1.480.000	75,90%	24,10%
14	Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan fasilitasi pemanfaatan langsung panas bumi	2 kali	2 kali	100%	1.950.000	1.480.000	75,90%	24,10%
ae	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	2 dokumen	2 dokumen	100%	1.950.000	1.480.000	75,90%	24,10%

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Indikator Kinerja Utama Dinas PMPTSP Kabupaten Kudus Tahun 2023 mempunyai persentase capaian dengan kategori “Sangat Tinggi” dan “Sedang” berdasarkan skala pengukuran kinerja (Permendagri No. 86 Tahun 2017).

Indikator kinerja Nilai Evaluasi SAKIP mempunyai persentase capaian yang fluktuatif antara tahun 2021 s/d 2023. Pada tahun 2022, persentase capaian mengalami peningkatan sebesar 21,4% dibandingkan tahun 2021 dan mengalami penurunan pada tahun 2023 sebesar 9,3%. Meskipun nilai hasil evaluasi menurun tetapi masih dapat mempertahankan predikat BB dengan predikat kinerja “Sangat Baik”.

Indikator kinerja Realisasi Investasi mempunyai persentase capaian yang fluktuatif antara tahun 2021 s/d 2023. Pada tahun 2022, realisasi dan persentase capaian mengalami penurunan sebesar 1,68 Trilyun dan 26,5%. Sementara pada tahun 2023, baik realisasi dan persentase capaian mengalami peningkatan sebesar 1,51 Trilyun dan 11,3 % dibandingkan tahun 2022.

Indikator ketiga Nilai Kinerja PTSP dan PPB merupakan indikator kinerja utama baru sebagai revisi dari indikator kinerja utama di tahun 2022 yaitu persentase pelayanan perizinan sesuai standar pelayanan. Realisasi dan persentase capaian tahun 2023 sebesar 60,96 dari target 83 sehingga persentasenya sebesar 73,4%.

Faktor pendorong keberhasilan kinerja DPMPTSP Kabupaten Kudus Tahun 2023 adalah adanya perbaikan kinerja yang dilakukan secara bertahap antara lain perbaikan kinerja dalam pelayanan perizinan di MPP, pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan, meningkatkan koordinasi dengan OPD teknis terkait perizinan maupun pengawasan penanaman modal serta pendampingan dan sosialisasi terhadap pelaku usaha dalam pelaporan LKPM. Sedangkan faktor penghambat keberhasilan kinerja di DPMPTSP Kabupaten Kudus Tahun 2023 yaitu kegiatan pembinaan dan pengawasan penanaman modal yang belum optimal dalam memenuhi target realisasi investasi dan pelaksanaan kegiatan promosi yang belum optimal karena keterbatasan anggaran dan personil.

4.2. Rekomendasi

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di masa mendatang antara lain :

1. Menyelesaikan penyusunan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang saat ini masih dalam tahap koreksi di Bagian Hukum agar kegiatan pemberian insentif kepada pelaku usaha dapat dilaksanakan.
2. Harmonisasi kebijakan di bidang perizinan dan penanaman modal yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
3. Meningkatkan pelayanan perizinan dengan melakukan inovasi pelayanan tambahan di setiap kecamatan.
4. Penambahan jumlah personil dan pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui pelatihan/bimtek.
5. Pembuatan peta potensi investasi dan penyusunan kajian potensi investasi yang menarik sebagai bahan promosi yang akan ditawarkan kepada investor dalam kegiatan promosi investasi.
6. Mengoptimalkan kegiatan pendampingan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha dalam pelaporan LKPM dan kewajiban penanaman modal lainnya.
7. Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan dinas terkait sebagai pemegang hak akses perizinan dan hak akses pengawasan OSS melalui pelatihan/bimtek maupun rapat koordinasi.
8. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka merealisasikan kepeminatan investor terhadap potensi investasi yang ditawarkan

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus Tahun 2023 kami susun agar dapat menjadi bahan evaluasi dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perbaikan atau peningkatan kinerja dan proses perencanaan tahun mendatang.

Kudus, Februari 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



HARSO WIDODO, AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19731014 199311 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Simpang Tujuh No. 1 Kudus Kode Pos 59313
Telp 0291435018 Fax 0291435018
email : dpmptsp@kuduskab.go.id Website : dpmptsp.kuduskab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HARSO WIDODO,A.P
Jabatan : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUDUS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : BERGAS C PENANGGUNGAN, S.SOS, M.Si
Jabatan : Pj. BUPATI KUDUS

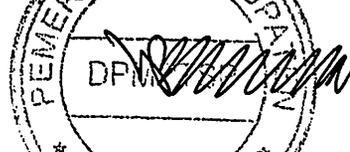
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua berjanji akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

BERGAS C PENANGGUNGAN, S.SOS, M.Si

Kudus, 20 Oktober 2023
Pihak Pertama,

HARSO WIDODO,A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19731014 199311 1 001

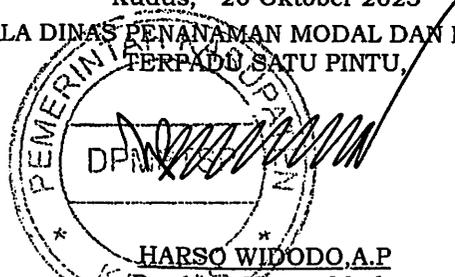
**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUDUS**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	76,50 Nilai
Meningkatnya iklim investasi	Realisasi Investasi	9,19 T
Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Nilai Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Percepatan Pelayanan Berusaha	83,00 Nilai

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.396.186.460	
2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	63.449.475	
3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	152.448.765	
4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	137.678.982	
5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	368.868.800	
6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	84.541.170	
7	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	1.950.000	
TOTAL		5.205.123.652	

BUPATI KUDUS,

BERGAS C PENANGGUNGAN, S.SOS, M.Si

Kudus, 20 Oktober 2023
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU,

HARSO WIDODO, A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19731014 199311 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Simpang Tujuh No. 1 Kudus Kode Pos 59313
Telp 0291435018 Fax 0291435018
email : dpmptsp@kuduskab.go.id Website : dpmptsp.kuduskab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MINTORO, AP
Jabatan : SEKRETARIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUDUS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : HARSO WIDODO, A.P
Jabatan : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUDUS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua;

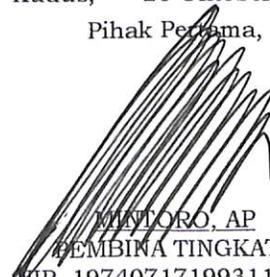
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua berjanji akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


HARSO WIDODO, A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19731014 199311 1 001

Kudus, 20 Oktober 2023
Pihak Pertama,


MINTORO, AP
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 197407171993111002

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUDUS**

SEKRETARIS

No.	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan)	Target
1	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (PTSP)	85 Indeks
	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi sesuai standar	29 dokumen
	Jumlah Laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai standar	29 laporan
	Jumlah laporan hasil pengelolaan kepegawaian sesuai standar	1 Laporan
	Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar	100 %
	Jumlah BMD yang diadakan sesuai ketentuan (perpres pengadaan barjas dan RKBU)	25 unit
	Jumlah laporan penggunaan jasa penunjang urusan yang sesuai ketentuan	5 Laporan
	Jumlah unit BMD yang dipelihara sesuai standar	43 unit

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.396.186.460	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.194.850	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.596.383.500	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	48.599.780	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	229.633.330	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	141.558.000	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	201.326.000	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	175.491.000	
	TOTAL	4.396.186.460	

Kudus, 20 Oktober 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

SEKRETARIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



HARSO WIDODO, A.P

Pembina Utama Muda

NIP. 19731014 199311 1 001

[Handwritten Signature]
MUYUDRO, AP
PEMBINA TINGKAT I

NIP. 197407171993111002



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Simpang Tujuh No. 1 Kudus Kode Pos 59313
Telp 0291435018 Fax 0291435018
email : dpmptsp@kuduskab.go.id Website : dpmptsp.kuduskab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : EMY ROCHMAIDA HARILASMI,SH
Jabatan : JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA (KOORDINATOR PENANAMAN MODAL)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUDUS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : HARSO WIDODO,A.P
Jabatan : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUDUS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua berjanji akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DPMPTSP
*
HARSO WIDODO,A.P
KUDUS
Pembina Utama Muda
NIP. 19731014 199311 1 001

Kudus, 20 Oktober 2023
Pihak Pertama,


EMY ROCHMAIDA HARILASMI,SH
PEMBINA
NIP. 197110211997032003

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUDUS**

JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA (KOORDINATOR PENANAMAN MODAL)

No.	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan)	Target
1	Cakupan Sinkronisasi Kebijakan Penanaman Modal	100 %
2	persentase peningkatan jumlah investor	10 persen
3	realisasi investasi yang dilaporkan	3,497 Trilyun
	Jumlah dokumen kebijakan pemberian kemudahan, fasilitasi/insentif di bidang penanaman modal	1 dokumen
	Jumlah sistem peta potensi yang dikelola	1 sistem
	Jumlah Promosi Penanaman Modal	1 kali
	Jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM	500 perusahaan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	63.449.475	
1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	6.551.250	
2	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	56.898.225	
2	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	152.448.765	
1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	152.448.765	
3	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	368.868.800	
1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	368.868.800	
	T O T A L	584.767.040	

Kudus, 20 Oktober 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



HARSO WIDODO, A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19731014 199311 1 001

JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA (
KOORDINATOR PENANAMAN MODAL) DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU



EMY ROCHMAIDA HARILASMI, SH
PEMBINA
NIP. 197110211997032003



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Simpang Tujuh No. 1 Kudus Kode Pos 59313
Telp 0291435018 Fax 0291435018
email : dpmtsp@kuduskab.go.id Website : dpmtsp.kuduskab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ARIF HERMANSYAH,ST
Jabatan : JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (SUB.KOORDINATOR PELAYANAN PERIZINAN
PEMBANGUNAN DAN PEREKONOMIAN) DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KUDUS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : HARSO WIDODO,A.P
Jabatan : KEPALA DINAS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN KUDUS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua berjanji akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


HARSO WIDODO,A.P
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19731014 199311 1 001

Kudus, 20 Oktober 2023
Pihak Pertama,


ARIF HERMANSYAH,ST
PENATA TINGKAT I
NIP. 197311272005011008

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUDUS**

**JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (SUB.KOORDINATOR PELAYANAN PERIZINAN
PEMBANGUNAN DAN PEREKONOMIAN)**

No.	Indikator Kinerja	Target
1	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	12 Orang
2	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	12 Dokumen

No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	7.497.132	
2	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	84.541.170	
TOTAL		92.038.302	

KEPALA DINAS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU



HARSO WIDODO, A.P
PEMBINA UJAMA MUDA
NIP. 19731014 199311 1 001

Kudus, 20 Oktober 2023
JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (SUB.KOORDINATOR PELAYANAN PERIZINAN
PEMBANGUNAN DAN PEREKONOMIAN)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

ARIF HERMANSYAH, ST
PENATA TINGKAT I
NIP. 197311272005011008



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Simpang Tujuh No. 1 Kudus Kode Pos 59313
Telp 0291435018 Fax 0291435018
email : dpmptsp@kuduskab.go.id Website : dpmptsp.kuduskab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FERI HARIYADI,SH
Jabatan : JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (SUB.KOORDINATOR PELAYANAN PERIZINAN LINGKUNGAN DAN JASA USAHA) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KUDUS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : HARSO WIDODO,A.P
Jabatan : KEPALA DINAS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KUDUS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua berjanji akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,

HARSO WIDODO,A.P
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19731014 199311 1 001

Kudus, 20 Oktober 2023

Pihak Pertama,

FERI HARIYADI,SH
PENATA TINGKAT I
NIP. 197302011994031008

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUDUS**

**JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (SUB.KOORDINATOR PELAYANAN PERIZINAN
LINGKUNGAN DAN JASA USAHA)**

No.	Indikator Kinerja	Target
1	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	7500 Pelaku Usaha
2	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	20 Kegiatan Usaha
3	Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen

No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	127.181.850	
2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	3.000.000	
3	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.950.000	
TOTAL		132.131.850	

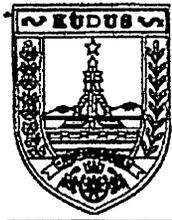
KEPALA DINAS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU



HARSO WIDODO, A.P
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19731014 199311 1 001

Kudus, 20 Oktober 2023
JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (SUB.KOORDINATOR PELAYANAN PERIZINAN
LINGKUNGAN DAN JASA USAHA)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

FERI HARIYATI, SH
PENATA TINGKAT I
NIP. 197302011993031008



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ARIYANTO,SH
Jabatan : JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (SUB.KOORDINATOR PENGAWASAN PENANAMAN MODAL) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KUDUS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : EMY ROCHMAIDA HARILASMI,SH
Jabatan : JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA (KOORDINATOR PENANAMAN MODAL) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KUDUS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

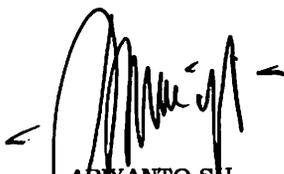
Pihak Kedua berjanji akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


EMY ROCHMAIDA HARILASMI,SH
PEMBINA
NIP. 197110211997032003

Kudus, 20 Oktober 2023

Pihak Pertama,


ARIYANTO,SH
PENATA TINGKAT I
NIP. 196801061989031004

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUDUS**

JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (SUB.KOORDINATOR PENGAWASAN PENANAMAN MODAL)

No.	Indikator Kinerja	Target
1	Jumlah dokumen bahan penyusunan kebijakan tentang kemudahan,fasilitas/Insentif di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Kabupaten	1 Dokumen
2	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen
3	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen
4	Jumlah dokumen tentang potensi dan atau kajian peluang investasi Kabupaten	1 Dokumen
5	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen
6	Jumlah dokumen bahan penyusunan strategi promosi penanaman modal Daerah	1 Dokumen
7	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen
8	Jumlah kegiatan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Kabupaten	4 kegiatan
9	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	4 Dokumen

No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	6.551.250	
2	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	0	
3	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	2.898.700	
4	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	53.999.525	
5	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	59.873.465	
6	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	92.575.300	
TOTAL		215.898.240	

Kudus, 20 Oktober 2023

JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA (KOORDINATOR
PENANAMAN MODAL)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (
SUB.KOORDINATOR PENGAWASAN PENANAMAN
MODAL)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU


EMY ROCHMAIDA HARILASM, SH
PEMBINA
NIP. 197110211997032003


ARIYANTO, SH
PENATA TINGKAT I
NIP. 196801061989031004



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Simpang Tujuh No. 1 Kudus Kode Pos 59313
Telp 0291435018 Fax 0291435018
email : dpmptsp@kuduskab.go.id Website : dpmptsp.kuduskab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BUDI RAHAYU,SE
Jabatan : JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (SUB.KOORDINATOR PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN PENANAMAN MODAL) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KUDUS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : EMY ROCHMAIDA HARILASMI,SH
Jabatan : JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA (KOORDINATOR PENANAMAN MODAL) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KUDUS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua berjanji akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

EMY ROCHMAIDA HARILASMI,SH
PEMBINA
NIP. 197110211997032003

Kudus, 20 Oktober 2023
Pihak Pertama,

BUDI RAHAYU,SE
PENATA TINGKAT I
NIP. 197703042005012010

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUDUS**

**JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (SUB.KOORDINATOR PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN
PENANAMAN MODAL)**

No.	Indikator Kinerja	Target
1	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	350 Pelaku Usaha
2	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	200 Kegiatan Usaha

No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	0	
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	265.419.800	
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	103.449.000	
TOTAL		368.868.800	

Kudus, 20 Oktober 2023

JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (KOORDINATOR
PENANAMAN MODAL)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (
SUB.KOORDINATOR PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN
PENANAMAN MODAL)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU


EMY ROCHMAIDA HARILASMI, SH
PEMBINA
NIP. 197110211997032003


BUDI RAHAYU, SE
PENATA TINGKAT I
NIP. 197703042005012010



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Simpang Tujuh No. 1 Kudus Kode Pos 59313
Telp 0291435018 Fax 0291435018
email : dpmptsp@kuduskab.go.id Website : dpmptsp.kuduskab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HAPYANA NUR PUJIASTUTI,ST
Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI, PELAPORAN DAN KEUANGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUDUS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : MINTORO, AP
Jabatan : SEKRETARIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN KUDUS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua berjanji akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


MINTORO, AP
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 197407171993111002

Kudus, 20 Oktober 2023
Pihak Pertama,


HAPYANA NUR PUJIASTUTI,ST
PENATA TINGKAT I
NIP. 198204092006042009

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUDUS**

KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI, PELAPORAN DAN KEUANGAN

No.	Indikator Kinerja	Target
1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen
2	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18 Laporan
3	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan
4	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen
5	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	17 Dokumen

No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.597.425	
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.597.425	
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.553.506.000	
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	41.280.000	
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.597.500	
TOTAL		3.599.578.350	

SEKRETARIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU


MURYORO, AP
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 197407171993111002

Kudus, 20 Oktober 2023
KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI,
PELAPORAN DAN KEUANGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU


HAPYANA NUR PUJIASTUTI, ST
PENATA TINGKAT I
NIP. 198204092006042009



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Simpang Tujuh No. 1 Kudus Kode Pos 59313
Telp 0291435018 Fax 0291435018
email : dpmptsp@kuduskab.go.id Website : dpmptsp.kuduskab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RADEN RARA SRI KARTINI HADI UTAMI, S.STP
Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KUDUS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : MINTORO, AP
Jabatan : SEKRETARIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN KUDUS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua berjanji akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,



MINTORO, AP
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 197407171993111002

Kudus, 20 Oktober 2023

Pihak Pertama,



RADEN RARA SRI KARTINI HADI UTAMI, S.STP
PENATA TINGKAT I
NIP. 197804211996122001

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUDUS**

KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

No.	Indikator Kinerja	Target
1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang
2	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
3	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket
4	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket
5	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket
6	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket
7	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen
8	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan
9	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	25 Unit
10	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan
11	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan
12	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan
13	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit
14	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit

No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	48.599.780	
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.691.000	
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.929.000	
4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.460.000	
5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	44.688.230	
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28.721.100	
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.400.000	
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	88.744.000	
9	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	141.558.000	
10	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	
11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	85.250.000	
12	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	111.076.000	
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	140.994.000	
14	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.497.000	
TOTAL		796.608.110	

Kudus, 20 Oktober 2023

KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

SEKRETARIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU


MINTORO, AP
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 197407171993111002


RADEN RARA SRI KARTINI HADI UTAMI, S.STP
PENATA TINGKAT I
NIP. 197804211996122001

RENCANA KERJA TAHUNAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2023

No_Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (PTSP)	85,00 Indeks	4.396.186.460	SEKRETARIS
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi sesuai standar	29,00 dokumen	3.194.850	SEKRETARIS
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11,00 Dokumen	1.597.425	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI, PELAPORAN DAN KEUANGAN
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18,00 Laporan	1.597.425	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI, PELAPORAN DAN KEUANGAN
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai standar	29,00 laporan	3.596.383.500	SEKRETARIS
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21,00 Orang/bulan	3.553.506.000	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI, PELAPORAN DAN KEUANGAN
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12,00 Dokumen	41.280.000	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI, PELAPORAN DAN KEUANGAN
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	17,00 Dokumen	1.597.500	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI, PELAPORAN DAN KEUANGAN
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan hasil pengelolaan kepegawaian sesuai standar	1,00 Laporan	48.599.780	SEKRETARIS
X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40,00 Orang	48.599.780	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar	100,00 %	229.633.330	SEKRETARIS
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1,00 Paket	3.691.000	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5,00 Paket	40.929.000	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4,00 Paket	14.460.000	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3,00 Paket	44.688.230	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2,00 Paket	28.721.100	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4,00 Dokumen	8.400.000	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30,00 Laporan	88.744.000	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan sesuai ketentuan (perpres pengadaan barjas dan RKBU)	25,00 unit	141.558.000	SEKRETARIS
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	25,00 Unit	141.558.000	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penggunaan jasa penunjang urusan yang sesuai ketentuan	5,00 Laporan	201.326.000	SEKRETARIS
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,00 Laporan	5.000.000	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1,00 Laporan	85.250.000	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2,00 Laporan	111.076.000	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit BMD yang dipelihara sesuai standar	43,00 unit	175.491.000	SEKRETARIS
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13,00 Unit	140.994.000	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30,00 Unit	34.497.000	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Cakupan Sinkronisasi Kebijakan Penanaman Modal	100,00 %	63.449.475	JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA (KOORDINATOR PENANAMAN MODAL)

No_Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kebijakan pemberian kemudahan, fasilitas/insentif di bidang penanaman modal	1,00 dokumen	6.551.250	JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA (KOORDINATOR PENANAMAN MODAL)
2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah dokumen bahan penyusunan kebijakan tentang kemudahan,fasilitas/insentif di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Kabupaten	1,00 Dokumen	6.551.250	JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (SUB.KOORDINATOR PENGAWASAN PENANAMAN MODAL)
		Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1,00 Dokumen		
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah sistem peta potensi yang dikelola	1,00 sistem	56.898.225	JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA (KOORDINATOR PENANAMAN MODAL)
2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen bahan perencanaan kegiatan penanaman modal tahun (N+1)	0,00 Dokumen	2.898.700	JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (SUB.KOORDINATOR PENGAWASAN PENANAMAN MODAL)
		Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1,00 Dokumen		
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen tentang potensi dan atau kajian peluang investasi Kabupaten	1,00 Dokumen	53.999.525	JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (SUB.KOORDINATOR PENGAWASAN PENANAMAN MODAL)
		Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1,00 Dokumen		
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	persentase peningkatan jumlah investor	10,00 persen	152.448.765	JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA (KOORDINATOR PENANAMAN MODAL)
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Penanaman Modal	1,00 kali	152.448.765	JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA (KOORDINATOR PENANAMAN MODAL)
2.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah dokumen bahan penyusunan strategi promosi penanaman modal Daerah	1,00 Dokumen	59.873.465	JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (SUB.KOORDINATOR PENGAWASAN PENANAMAN MODAL)
		Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1,00 Dokumen		
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Kabupaten	4,00 kegiatan	92.575.300	JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (SUB.KOORDINATOR PENGAWASAN PENANAMAN MODAL)
		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	4,00 Dokumen		
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelayanan perizinan pembangunan dan lingkungan yang sesuai standar pelayanan	60,00 %	137.678.982	KEPALA DINAS
		Persentase pelayanan perizinan perekonomian dan jasa usaha yang sesuai standar pelayanan	80,00 %		
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah perizinan terbit sesuai dengan standar pelayanan	12.000,00 SK	137.678.982	KEPALA DINAS
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	7.500,00 Pelaku Usaha	127.181.850	JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (SUB.KOORDINATOR PELAYANAN PERIZINAN LINGKUNGAN DAN JASA USAHA)
2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	20,00 Kegiatan Usaha	3.000.000	JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (SUB.KOORDINATOR PELAYANAN PERIZINAN LINGKUNGAN DAN JASA USAHA)
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	12,00 Orang	7.497.132	JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (SUB.KOORDINATOR PELAYANAN PERIZINAN PEMBANGUNAN DAN PEREKONOMIAN)
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	realisasi investasi yang dilaporkan	3,50 Trilyun	368.868.800	JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA (KOORDINATOR PENANAMAN MODAL)
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM	500,00 perusahaan	368.868.800	JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA (KOORDINATOR PENANAMAN MODAL)

No_Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	350,00 Pelaku Usaha	265.419.800	JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (SUB.KOORDINATOR PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN PENANAMAN MODAL)
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	0,00 Kegiatan Usaha	103.449.000	JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (SUB.KOORDINATOR PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN PENANAMAN MODAL)
		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	200,00 Kegiatan Usaha		
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Cakupan Data dan Informasi Penanaman Modal yang dirilis	100,00 %	84.541.170	KEPALA DINAS
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sistem informasi yang dikelola	2,00 aplikasi	84.541.170	KEPALA DINAS
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	12,00 Dokumen	84.541.170	JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (SUB.KOORDINATOR PELAYANAN PERIZINAN PEMBANGUNAN DAN PEREKONOMIAN)
3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	cakupan fasilitas perizinan pemanfaatan energi dan sumber daya mineral	100,00 persen	1.950.000	KEPALA DINAS
3.29.05.2.01	Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan fasilitasi pemanfaatan langsung panas bumi	2,00 kali	1.950.000	KEPALA DINAS
3.29.05.2.01.02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	2,00 Dokumen	1.950.000	JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (SUB.KOORDINATOR PELAYANAN PERIZINAN LINGKUNGAN DAN JASA USAHA)

Kudus,
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

HARSO WIDODO,A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19731014 199311 1 001

**REALISASI TUJUAN, SASARAN, DAN INDIKATOR UTAMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KUDUS
PERIODE 2019 - 2023**

Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator Kinerja Utama	Formula	Satuan	Target Tahun	Realisasi IKU OPD per Triwulan				Persentase Realisasi IKU OPD
						Tw. 1	Tw. 2	Tw. 3	Tw. 4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatkan Pertumbuhan Investasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Hasil evaluasi dari Inspektorat	Nilai	76,50	78,28	78,28	71,70	71,70	102,33 %
Meningkatkan Pertumbuhan Investasi	Meningkatnya iklim investasi	Realisasi Investasi	Penjumlahan Nilai Realisasi Investasi dilaporkan dan Realisasi Investasi yang belum dilaporkan	Triiyun	9,19	1,09	5,10	10,95	11,80	128,40 %
Meningkatkan Pertumbuhan Investasi	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Nilai Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Percepatan Pelayanan Berusaha	Hasil Penilaian dari BKPM	Nilai	83,00	82,55	82,55	82,55	60,97	73,46 %

Keterangan Warna

Warna	Prosentase	Keterangan
	0 s/d 50	Sangat Rendah
	50.1 s/d 65	Rendah
	65.1 s/d 75	Sedang
	75.1 s/d 90	Tinggi
	90.1 lebih	Sangat Tinggi

(sumber : Permendagri 86 / 2017)

**REALISASI PROGRAM ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KUDUS
BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2023**

No_Rekening	Program	Indikator	Target Kinerja		Anggaran	Capaian Anggaran/Kinerja	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
1	2	3	4		5	6	7	8	9
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.396.186.460	4.061.678.098		92,39 %	12,07 %
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (PTSP)	85	Indeks		88,79	SEKRETARIS	104,46 %	
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				63.449.475	57.599.430		90,78 %	9,22 %
		Cakupan Sinkronisasi Kebijakan Penanaman Modal	100	%		100,00	JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA (KOORDINATOR PENANAMAN MODAL)	100,00 %	
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				152.448.765	143.448.090		94,10 %	2.057,00 %
		persentase peningkatan jumlah investor	10	persen		215,11	JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA (KOORDINATOR PENANAMAN MODAL)	2.151,10 %	
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				137.678.982	128.514.900		93,34 %	52,49 %
		Persentase pelayanan perizinan pembangunan dan lingkungan yang sesuai standar pelayanan	60	%		100,00	KEPALA DINAS	166,67 %	
		Persentase pelayanan perizinan perekonomian dan jasa usaha yang sesuai standar pelayanan	80	%		100,00	KEPALA DINAS	125,00 %	
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				368.868.800	281.422.656		76,29 %	-27,97 %
		realisasi investasi yang dilaporkan	3.497	Trilyun		1,69	JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA (KOORDINATOR PENANAMAN MODAL)	48,33 %	
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				84.541.170	81.897.715		96,87 %	3,13 %
		Cakupan Data dan Informasi Penanaman Modal yang dirilis	100	%		100,00	KEPALA DINAS	100,00 %	
3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN				1.950.000	1.480.000		75,90 %	24,10 %
		cakupan fasilitasi perizinan pemanfaatan energi dan sumber daya mineral	100	persen		100,00	KEPALA DINAS	100,00 %	

**REALISASI KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KUDUS
BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2023**

No_Rekening	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Capaian Anggaran/Kinerja Bulan Desember Tahun 2023	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			3.194.850	3.157.500		98,83 %	1,17 %
		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi sesuai standar	29 dokumen		29,00	SEKRETARIS	100,00 %	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.596.383.500	3.311.409.290		92,08 %	7,92 %
		Jumlah Laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai standar	29 laporan		29,00	SEKRETARIS	100,00 %	
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			48.599.780	48.560.000		99,92 %	0,08 %
		Jumlah laporan hasil pengelolaan kepegawaian sesuai standar	1 Laporan		1,00	SEKRETARIS	100,00 %	
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			229.633.330	216.083.452		94,10 %	5,90 %
		Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar	100 %		100,00	SEKRETARIS	100,00 %	
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			141.558.000	137.726.500		97,29 %	2,71 %
		Jumlah BMD yang diadakan sesuai ketentuan (perpres pengadaan barjas dan RKBU)	25 unit		25,00	SEKRETARIS	100,00 %	
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			201.326.000	188.893.546		93,82 %	6,18 %
		Jumlah laporan penggunaan jasa penunjang urusan yang sesuai ketentuan	5 Laporan		5,00	SEKRETARIS	100,00 %	
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			175.491.000	155.847.810		88,81 %	11,19 %
		Jumlah unit BMD yang dipelihara sesuai standar	43 unit		43,00	SEKRETARIS	100,00 %	
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			6.551.250	4.300.000		65,64 %	14,36 %
		Jumlah dokumen kebijakan pemberian kemudahan, fasilitasi/insentif di bidang penanaman modal	1 dokumen		0,80	JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA (KOORDINATOR PENANAMAN MODAL)	80,00 %	
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			56.898.225	53.299.430		93,68 %	6,32 %
		Jumlah sistem peta potensi yang dikelola	1 sistem		1,00	JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA (KOORDINATOR PENANAMAN MODAL)	100,00 %	
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			152.448.765	143.448.090		94,10 %	5,90 %
		Jumlah Promosi Penanaman Modal	1 kali		1,00	JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA (KOORDINATOR PENANAMAN MODAL)	100,00 %	

No_Rekening	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Capaian Anggaran/Kinerja Bulan Desember Tahun 2023	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			137.678.982	128.514.900		93,34 %	6,66 %
		Jumlah perizinan terbit sesuai dengan standar pelayanan	12000 SK		14.553,00	KEPALA DINAS	100,00 %	
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			368.868.800	281.422.656		76,29 %	23,71 %
		Jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM	500 perusahaan		636,00	JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA (KOORDINATOR PENANAMAN MODAL)	100,00 %	
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			84.541.170	81.897.715		96,87 %	3,13 %
		Jumlah sistem informasi yang dikelola	2 aplikasi		2,00	KEPALA DINAS	100,00 %	
3.29.05.2.01	Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota			1.950.000	1.480.000		75,90 %	24,10 %
		Jumlah koordinasi dan fasilitasi pemanfaatan langsung panas bumi	2 kali		2,00	KEPALA DINAS	100,00 %	

**REALISASI SUB KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2023**

No_Rekening	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Anggaran	Capaian Anggaran/Kinerja Bulan Desember Tahun 2023	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
1	2	3	4		5	6	7	8	9
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.597.425	1.569.500	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI, PELAPORAN DAN KEUANGAN	98,25 %	1,75 %
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11	Dokumen		11,00		100,00 %	
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.597.425	1.588.000	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI, PELAPORAN DAN KEUANGAN	99,41 %	0,59 %
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18	Laporan		18,00		100,00 %	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				3.553.506.000	3.268.552.740	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI, PELAPORAN DAN KEUANGAN	91,98 %	8,02 %
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21	Orang/bulan		21,00		100,00 %	
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				41.280.000	41.280.000	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI, PELAPORAN DAN KEUANGAN	100,00 %	0,00 %
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen		12,00		100,00 %	
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1.597.500	1.576.550	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI, PELAPORAN DAN KEUANGAN	98,69 %	1,31 %
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	17	Dokumen		17,00		100,00 %	
X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				48.599.780	48.560.000	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	99,92 %	0,08 %
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40	Orang		40,00		100,00 %	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.691.000	3.611.500	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	97,85 %	2,15 %
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket		1,00		100,00 %	
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				40.929.000	40.685.000	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	99,40 %	0,60 %
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Paket		5,00		100,00 %	
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				14.460.000	10.480.600	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	72,48 %	27,52 %
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	Paket		4,00		100,00 %	
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				44.688.230	38.777.500	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	86,77 %	13,23 %
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	Paket		3,00		100,00 %	

No_Rekening	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Capaian Anggaran/Kinerja Bulan Desember Tahun 2023	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			28.721.100	25.830.700	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	89,94 %	10,06 %
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2,00		100,00 %	
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			8.400.000	8.310.000	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	98,93 %	1,07 %
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen		4,00		100,00 %	
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			88.744.000	88.388.152	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	99,60 %	0,40 %
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan		38,00		100,00 %	
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			141.558.000	137.726.500	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	97,29 %	2,71 %
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	25 Unit		25,00		100,00 %	
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			5.000.000	3.824.000	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	76,48 %	23,52 %
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan		2,00		100,00 %	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			85.250.000	74.220.000	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	87,06 %	12,94 %
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1,00		100,00 %	
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			111.076.000	110.849.546	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	99,80 %	0,20 %
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2,00		100,00 %	
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			140.994.000	127.999.310	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	90,78 %	9,22 %
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit		13,00		100,00 %	
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			34.497.000	27.848.500	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	80,73 %	19,27 %
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit		30,00		100,00 %	
2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal			6.551.250	4.300.000	JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (SUB.KOORDINATOR PENGAWASAN PENANAMAN MODAL)	65,64 %	24,36 %
		Jumlah dokumen bahan penyusunan kebijakan tentang kemudahan,fasilitas/Insentif di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Kabupaten	1 Dokumen		1,00		100,00 %	
		Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen		0,80		80,00 %	

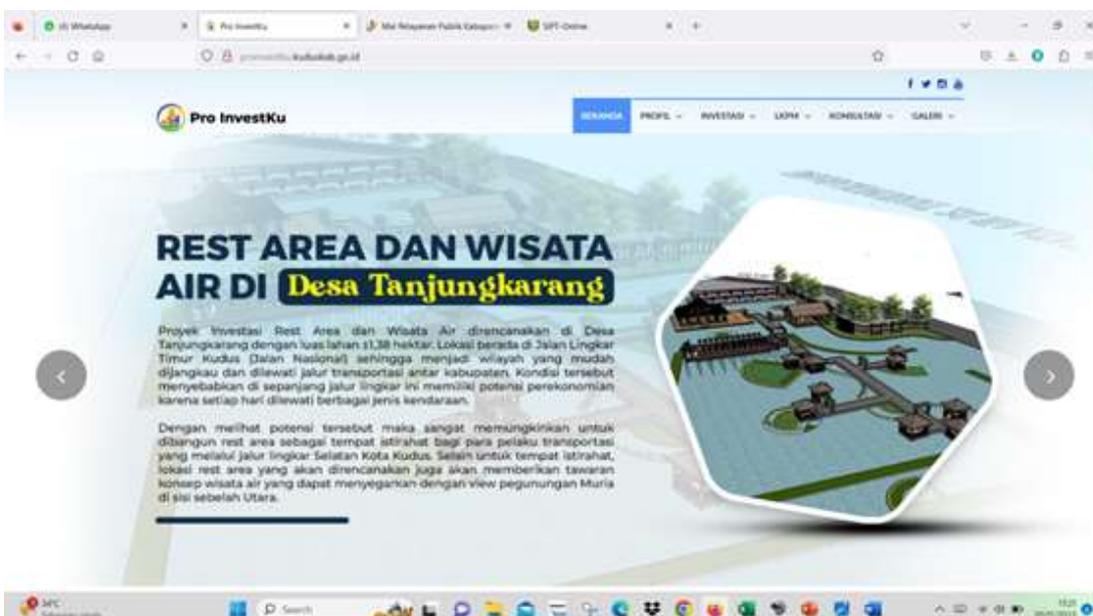
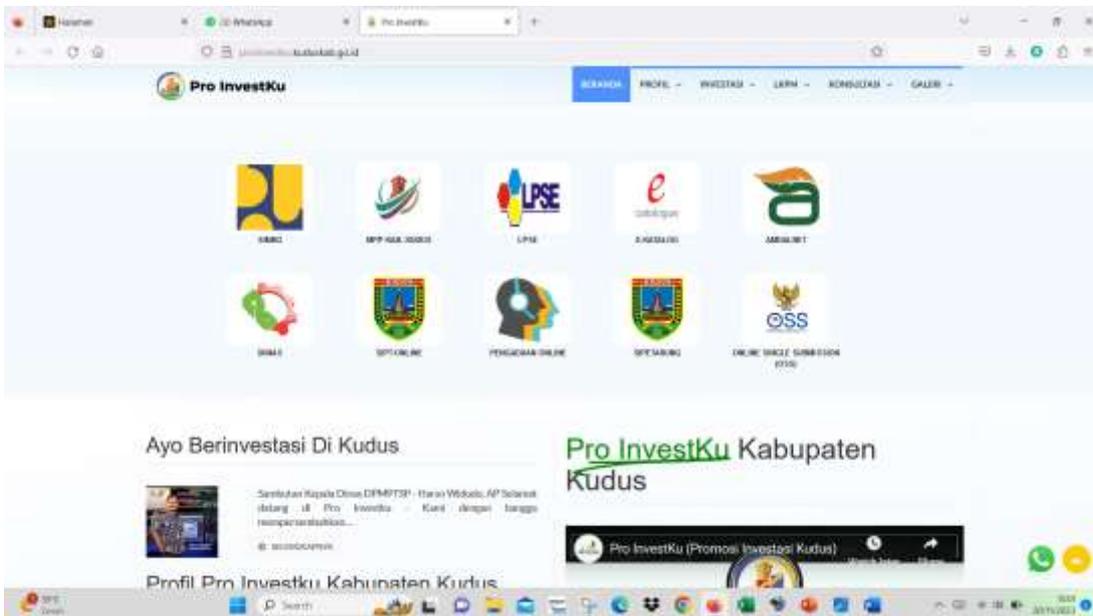
No_Rekening	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Capaian Anggaran/Kinerja Bulan Desember Tahun 2023	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota			2.898.700	1.460.000	JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (SUB.KOORDINATOR PENGAWASAN PENANAMAN MODAL)	50,37 %	49,63 %
		Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1,00		100,00 %	
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota			53.999.525	51.839.430	JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (SUB.KOORDINATOR PENGAWASAN PENANAMAN MODAL)	96,00 %	4,00 %
		Jumlah dokumen tentang potensi dan atau kajian peluang investasi Kabupaten	1 Dokumen		1,00		100,00 %	
		Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1,00		100,00 %	
2.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal			59.873.465	58.513.090	JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (SUB.KOORDINATOR PENGAWASAN PENANAMAN MODAL)	97,73 %	2,27 %
		Jumlah dokumen bahan penyusunan strategi promosi penanaman modal Daerah	1 Dokumen		1,00		100,00 %	
		Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1,00		100,00 %	
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota			92.575.300	84.935.000	JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (SUB.KOORDINATOR PENGAWASAN PENANAMAN MODAL)	91,75 %	8,25 %
		Jumlah kegiatan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Kabupaten	4 kegiatan		4,00		100,00 %	
		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	4 Dokumen		4,00		100,00 %	
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			127.181.850	124.594.900	JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (SUB.KOORDINATOR PELAYANAN PERIZINAN LINGKUNGAN DAN JASA USAHA)	97,97 %	2,03 %
		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	7500 Pelaku Usaha		9.135,00		100,00 %	
2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal			3.000.000	3.000.000	JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (SUB.KOORDINATOR PELAYANAN PERIZINAN LINGKUNGAN DAN JASA USAHA)	100,00 %	0,00 %
		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	20 Kegiatan Usaha		21,00		100,00 %	
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan			7.497.132	920.000	JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (SUB.KOORDINATOR PELAYANAN PERIZINAN PEMBANGUNAN DAN PEREKONOMIAN)	12,27 %	87,73 %
		Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	12 Orang		12,00		100,00 %	

No_Rekening	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Capaian Anggaran/Kinerja Bulan Desember Tahun 2023	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal			265.419.800	228.904.156	JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (SUB.KOORDINATOR PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN PENANAMAN MODAL)	86,24 %	13,76 %
		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	350 Pelaku Usaha		401,00		100,00 %	
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal			103.449.000	52.518.500	JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (SUB.KOORDINATOR PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN PENANAMAN MODAL)	50,77 %	49,23 %
		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	200 Kegiatan Usaha		282,00		100,00 %	
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			84.541.170	81.897.715	JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (SUB.KOORDINATOR PELAYANAN PERIZINAN PEMBANGUNAN DAN PEREKONOMIAN)	96,87 %	3,13 %
		Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	12 Dokumen		12,00		100,00 %	
3.29.05.2.01.02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota			1.950.000	1.480.000	JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (SUB.KOORDINATOR PELAYANAN PERIZINAN LINGKUNGAN DAN JASA USAHA)	75,90 %	24,10 %
		Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen		2,00		100,00 %	

PENGHARGAAN YANG DIRAIH



INOVASI KEMUDAHAN INVESTASI MELALUI PRO INVESTKU



SOSIALISASI PRO INVESTKU DAN PENDAMPINGAN LKPM



SOSIALISASI DAN BIMTEK IMPLEMENTASI PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO (OSS RBA)





FGD PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN HAMBATAN REALISASI USAHA





Nilai Kinerja PTSP dan PPB Tahun 2023



Nomor : 154/B.3/A.7/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Informasi hasil Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) Kabupaten Kudus Tahun 2023.

Jakarta, 23 November 2023

Kepada Yth.

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kudus
di -

Tempat

Sehubungan dengan surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus No. 570/931/15.00/2023 tanggal 24 Oktober 2023 perihal Hasil Penilaian Kinerja PTSP dan PPB 2023, dengan ini kami menyampaikan informasi hasil Penilaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kudus pada Tahun 2023 sesuai hasil verifikasi dan validasi lapangan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Daerah	Peringkat	Nilai Akhir	Kategori
1.	Kabupaten Kudus	234 dari 415 Kabupaten	60,967	Baik

Keterangan :

Kategori hasil Penilaian Kinerja:

1. Sangat Baik (80,00 s.d 100,00)
2. Baik (60,00 s.d 79,99)
3. Kurang Baik (Kurang dari 59,99)

Demikian, atas perhatian dan kerja samanya, kami menyampaikan terima kasih.

Direktur Kerja Sama Pelaksanaan
Berusaha



Jhonny Sakti Meyer Siburian

Tembusan Yth. :

Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal, Kementerian Investasi/BKPM.